BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENSTRA

TAHUN 2025-2029



2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Dearah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
    1) Inspektorat Daerah;
    2) Dinas Pendidikan;
    3) Dinas Kesehatan;
    4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    6) Dinas Sosial;
    7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    8) Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    9) Dinas Ketahanan Pangan;
    10) Dinas Lingkungan Hidup;
    11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13) Dinas Perhubungan;
14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
21) Dinas Perkebunan;
22) Dinas Kehutanan;
23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
29) Badan Pendapatan Daerah;
30) Badan Kepegawaian Daerah;
31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32) Badan Penanggulangan Bencana;
33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
34) Badan Penghubung;
35) Sekretariat DPRD; dan
36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

(1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
e. Penutup.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

(2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LEONARD S. AMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai acuan lima tahun kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana pada akhirnya telah rampung.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan buku ini yang diharapkan pelaksanaannya efektif selama lima tahun, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan Rencana Strategis ini, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Palangka Raya, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BPBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

AHMAD TOYIB, S.STP, M.Si
NIP. 197903191997111001

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
DAFTAR TABEL			**iv**
DAFTAR GAMBAR			**v**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	10
	1.4	Sistematika Penuisan	11
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**		**13**
	2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	13
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	26
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
	2.4	Kelompok Sasaran Layanan	51
	2.5	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	52
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**		**57**
	3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	59
	3.2	Strategi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	60
	3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	61
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**		**66**

BAB V PENUTUP **88**

5.1 Kesimpulan 88

5.2 Kaidah Pelaksanaan 89

5.3 Pengendalian dan Operasi 89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	26
Tabel 2.2	Pangkat/Golongan PNS dan PPPK di BPBD Prov. Kalimantan Tengah	27
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Kalteng	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Bpbd Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 S.D 2024	49
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBDProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024	50
Tabel 2.6	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Deerah	55
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	56
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra PD	59
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	62
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	64
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	66
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	92
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukiung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	123
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	123

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemi dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022 yaitu:

- ***Tingkat risiko Rendah*** untuk jenis bencana Covid-19, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gempabumi, Kegagalan Teknologi dan Tsunami.
- ***Tingkat risiko Sedang*** untuk bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi.
- ***tingkat risiko Tinggi*** untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan serta Tanah Longsor.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisa potensi bencana daerah Indeks Resiko Bencana Kalimantan Tengah berdasrakan Indeks Risiko Bencana Indonesia di 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dikategori Sedang.

Selain kondisi alam dan sosisal-budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Penanggulangan bencana masih menitik beratkan kepada kegiatan tanggap darurat saja;
2. Masih bertumpu kepada peran dan kemampuan pemerintah daerah;
3. Belum efektifnya kolaborasi antar unit/institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Belum efektifnya kolaborasi tiga pilar penanggulangan bencana yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Menyikapi permasalahan tersebut sekaligus sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia diselenggarakan melalui Manajemen Penanggulangan Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024 BPBD melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, nomeklatur instansi berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. dimana Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi,
2. Unsur Pengarah, berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari: 6 (enam) Pejabat Pemerintah; dan 5 (lima) Anggota masyarakat profesional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran,
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat insidentil sebagai respon terhadap keadaan darurat bencana, akan tetapi keseluruhan upaya yang meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana yang memberikan output pengurangan resiko bencana secara terukur, penanganan yang semakin cepat dan tepat saat terjadi bencana serta pemulihan yang semakin tepat dan efektif terhadap dampak setiap bencana. Untuk mencapai ini maka pada perencanaan kerja jangka menengah sebagai arahan dan pedoman dan pedoman sekaligus instrumen pengukur kinerja penanggulangan bencana 5 (lima) tahunan.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategi ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pemetaan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana sudah dituangkan pada Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182)
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentangb Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10); dan
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 11 Nomor 2024).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

   Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan dalam jangka menengah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman umum arah pembangunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

2. **Tujuan**

   Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

   a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan yang diharapkan;
   b. Menjamin sinkronisasi dan keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
   c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam suatu pola sikap dan tindakan;
   d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
   e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan daerah kabupaten/kota di dalam provinsi, provinsi yang berbatasan, dan pembangunan nasional;
   f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan,dan berkelanjutan;

g. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
h. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
i. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) berupa program, target, dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program, target, dan pagu indikatif dalam rangka penyusunan prioritas daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terlihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penuisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Operasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah. Maka dilakukan penyesuaian dengan dibentuk kembali berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai Kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Kedudukan** Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah:
   a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana..
2. **Tugas** Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah:
   Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
3. **Fungsi** Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah:
   a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;

d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. **Susunan Organisasi** Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Kepala Badan;
   b. Unsur Pengarah;
   c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
      1) Kepala Pelaksana
      2) Sekretariat, terdiri atas:
         a) Sub Bagian Penyusunan Program;
         b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
         c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
      4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
      5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
      6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
      7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan).

5. **Tugas dan Fungsi**
   a. Kepala Badan;

   Kepala Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi.

   b. Unsur Pengarah;

   Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
   1) perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
   2) pemantauan; dan

3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

c. Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2) pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi Perangkat daerah dan instansi lainnya kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
3) pengoordinasian kebijakan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
4) penyusunan pola perencanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana dan menurut tingkat dan tahapannya;
5) penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
7) kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya kegiatan

prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana; dan

8) pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan.

d. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan;
2) penyiapan bahan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan;
3) penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan;
4) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
5) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6) pelaksanaan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
7) pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- Subbagian Penyusunan Program

  Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

program, anggaran dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
2) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) badan;
3) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
5) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
6) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) badan;
7) pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
8) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Subbagian Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program; dan
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- Subbagian Keuangan dan Aset

  Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian keuangan dan aset.

  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

  1) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  2) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  3) pelaksanaan pengelolaaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4) pengelolaan urusan perbendaharaan;
  5) pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset; penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang perangkat daerah;
  6) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
  7) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  8) penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
3) penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
4) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5) penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
6) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
7) pengelolaan administrasi kepegawaian;

8) pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9) pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
11) penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi ancaman bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

2) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
3) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
4) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
5) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
6) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
7) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana;
8) pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau Lembaga terkait dibidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana; dan
9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

f. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat;
3) pengoordinasiaan dan pelaksanaan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
4) pelaksanaan kerja sama penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5) pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kepastian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB);
6) pengoordinasian dan Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB);
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanganan keadaan darurat, logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
2) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;

3) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
4) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
5) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
6) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
7) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
8) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
9) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
10) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
11) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
12) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

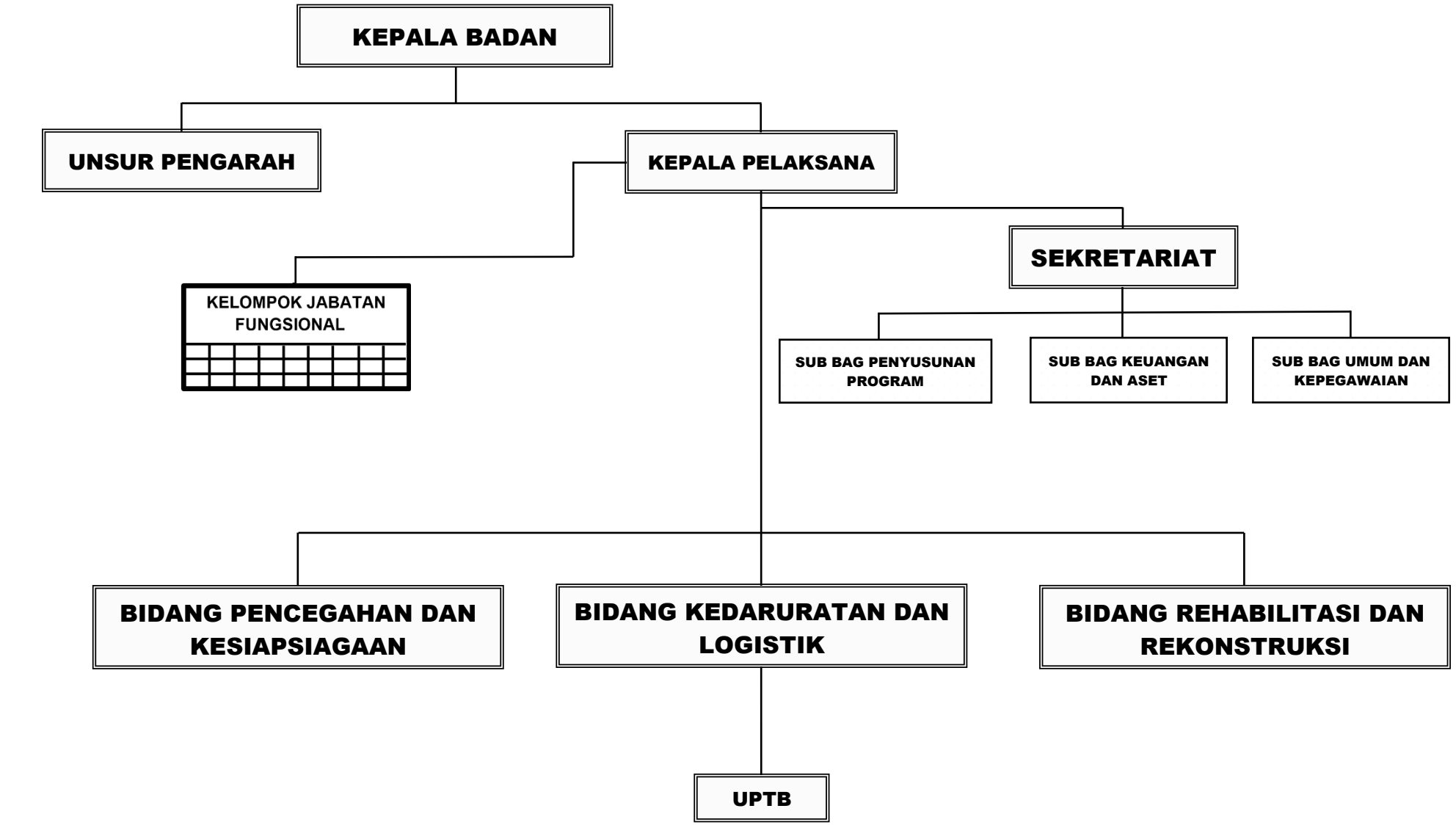
13) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
14) pelaksanaan kerja sama di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana; dan
15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Lampiran : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 60 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

GAMBAR 1.1

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pegawai yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pegawai Kontrak adalah aset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Keadaan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini bila dikaitkan dengan akselerasi pelaksanaan tugas, diyakini masih jauh dari keadaan ideal untuk dapat menyelenggarakan rangkaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka kondisi aparatur SDM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai

Berdasar data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah berjumlah 83 orang, terdiri dari PNS sebanyak 43 orang, PPPK sebanyak 31 orang dan Pegawai Kontrak 9 orang. Sehingga, dapat dilihat bahwa masih kurangnya tenaga dibandingkan dengan kapasitas pekerjaan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir						
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PNS	33	10	11	19	2	11	-	-	43
2	PPPK	19	12	-	23	-	8	-	-	31
2	Pegawai Kontrak	7	2	-	1	-	8	-	-	9
	Total	49	24	11	43	2	27	-	-	83

Sumber : Data Pegawai BPBD per Juni 2025

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pangkat/Golongan PNS dan PPPK
di BPBD Prov. Kalimantan Tengah

PNS

No	Pangkat / Gol		Jumlah	
1	2		3	
1	**Golongan IV**	**:**	**10**	**orang**
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	:	3	orang
c	Pembina (IV/a)	:	6	orang
2	**Golongan III**		**26**	**orang**
a	Penata Tk I (III/d)	:	12	orang
b	Penata (III/c)	:	4	orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	:	7	orang
d	Penata Muda (III/a)	:	3	orang
3	**Golongan II**		**7**	**orang**
a	Pengatur Tk I (II/d)	:	2	orang
b	Pengatur (II/c)	:	5	orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	:	-	orang
d	Pengatur Muda (II/a)	:	-	orang
4	**Golongan I**		**-**	**orang**
a	Juru Tk I (I/d)	:	-	orang
b	Juru (I/c)	:	-	orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	:	-	orang
d	Juru Muda (I/a)	:	-	orang
	JUMLAH	**:**	**43**	**orang**

Sumber : Data Pegawai BPBPK per Juni 2025

PPPK

No	Pangkat / Gol		Jumlah	
1	2		3	
1	**Golongan IX**	**:**	**23**	**orang**
2	**Golongan V**		**8**	**orang**
	JUMLAH	**:**	**31**	**orang**

Sumber : Data Pegawai BPBD per Juni 2025

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya walaupun peningkatannya belum begitu signifikan.

Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara garis besar meliputi, pemeliharaan gedung kantor, penyediaan ruang penyimpanan logistik dan alat peralatan yang refresentatif, perlengkapan perlindungan diri personil, kendaraan bermotor untuk operasional lapangan, perangkat komputer, penambahan meubelier seperti lemari arsip, meja kerja, kursi kerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang di anggap perlu sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai pada saat ini seperti pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Kalteng

No.	Jenis /Nama barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	keterangan
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14		15	16
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0001	Baik	Tidak	Beton	-	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	599,058,500	Pembangunan Gedung Kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0002	Baik	Tidak	Beton	34.20 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	891,030,400	pembangunan gudang logistik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0003	Baik	Tidak	Beton	238.50 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	16-Sep-2013	360/410/IV.4/BPB		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	229,039,000	Lanjutan gudang grasi
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0004	Baik	Tidak	Beton	456 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	-	-			-	Pembelian	1,132,132,400	gedung kantor
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0005	Baik	Tidak	Beton	328	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	-	-			-	Pembelian	316,082,100	gedung kantor thn 2014.plapon
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	6	Baik	Tidak	Beton	266.40 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	-	-			-	Pembelian	1,113,113,000	bangunan gudang logistik 2 tingkat
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.11.01.01.04	0001	Baik	Tidak	Beton	374 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	-	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	189,449,600	Bangunan Tempat parkir
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.01	0002	Baik	Tidak	Beton	103.53 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2012	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	475,968,800	bm pengadaan kontruksi bangunan material
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.01	0003	Baik	Tidak	Beton	-	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2012	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	548,136,850	bm bangunan logistik
10	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0001	Baik	Tidak	Beton	43.2 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	16-Sep-2013	360/415/IV.4/BPBD		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	214,304,000	pos posko
11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	03.11.01.14.02	0001	Baik	Tidak	Tidak	90.60 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2012	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	50,994,000	bm pengadaan parkir
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.11.01.27.01	0001	Baik	Tidak	Beton	104 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	16-Sep-2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	224,496,000	bm pengadaan gapura
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.04	0001	Baik	Tidak	Beton	41 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	16-Sep-2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	229,039,000	bm pengadaan tembok belakang
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.04	0002	Baik	Tidak	Beton	22 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	16-Sep-2013	360/414/IV.4/BPBD		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	253,787,572	bm pengadaan tembok depan
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.04	0003	Baik	Tidak	Tidak	-	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	186,446,198	bm penataan halaman
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.04	0004	Baik	Tidak	Beton	-	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	183,642,617	bm gedung rumah kantor
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	03.11.01.27.04	0005	Baik	Tidak	Beton	54 m²	Jln Tjilik Riwut km.7,8 Palangka Raya	31/12/2013	-		Tanah Milik Pemda	-	Pembelian	240,042,617	bm pengadaan gedung gudang

No.	Kode Barang	Jenis barang/Nama barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	KETERANGAN
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0005	SUZUKI / AN 125	125 CC	Besi	2010		MH8EN125AAJ623526	FA051D62362	KH 5176 AY	H-02099310	Pembelian	16,533,611.00	
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0006	SUZUKI / AN 125	125 CC	Besi	2010		MH8EN125AAJ625350	F4051D6225319	KH 5187 AY	H-02099321	Pembelian	16,533,611.00	
3	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	KAYU JATI		KAYU	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	9,860,000.00	
4	02.06.04.01.07	Meja Kerja Pejabat Eselon V	0001 s/d 009	AGATHIS / KAYU		KAYU	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	11,520,000.00	
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0003	YAMAHA JUPITER / Z-CW	125 CC	besi	2011		MH331800381	318957200	KH 5357 AY	105936730M	Pembelian	15,120,000.00	
6	02.06.04.01.07	Meja Kerja Pejabat Eselon V	0028 s/d 0039	-		kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	28,800,000.00	
7	02.06.02.01.63	MOUBILER LAINNYA	0001	-		kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	9,750,000.00	
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0004	HONDA SUPRA XTD / NF125TD4	125 CC	besi	2013		MH1J88115DK864969	1881E1860767	KH 5633 AY	K00652944M	Pembelian	15,690,216.00	
9	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	0001 s/d 0200	chitose		besi	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	115,000,000.00	
10	02.06.02.04.04	AC Split	7	LG		PLASTIK	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	28,000,000.00	
11	02.06.02.06.03	Televisi	0011 s/d 0013	LCD DIGITAL		PLASTIK	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	10,200,000.00	
12	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001 s/d 0010	-			2013	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000,000.00	
13	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0001 s/d 0004	-			2013	-	-	-	-	-	Pembelian	25,116,000.00	
14	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0028 s/d 0037	-		plat/besi	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	36,900,000.00	
15	02.06.01.05.07	Papan Pengumunan	0001 s/d 0002	-		kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	3,600,000.00	
16	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0012 s/d 0021	-		kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	10,500,000.00	
17	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0011 s/d 0035	-		kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	53,750,000.00	
18	02.06.02.01.15	Meja Podium	0001 s/d 0002	-		kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	10,800,000.00	
19	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0002 s/d 0003	-		kayu/rotan	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	19,200,000.00	
20	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	0001 s/d 0020	-		plastik / busa	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	6,500,000.00	
21	02.06.02.04.01	Lemari Es	0004 s/d 0007	lg		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	12,000,000.00	
22	02.06.02.04.04	AC Split	0021 s/d 0030	lg		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	50,000,000.00	
23	02.06.02.05.15	Dispenser	0005 s/d 0006	sharp		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	7,600,000.00	
24	02.06.02.06.02	Radio	0001	STD		PLASTIK	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	12,300,000.00	
25	02.06.02.06.08	Sound System	0001	std			2014	-	-	-	-	-	Pembelian	8,000,000.00	

26	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0020 s/d 0022	HP			2014	-	-	-	-	-	Pembelian	34,400,000.00	
27	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0023 s/d 0024	dell		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	34,400,000.00	
28	02.06.03.02.02	Lap Top	0010	ASUS		PLASTIK	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	14,100,000.00	
29	02.06.03.04.08	Printer	0021 s/d 0029	EPSON		PLASTIK	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	25,520,000.00	
30	02.06.04.01.10	Meja Kerja	0001 s/d 0020	-		kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	42,000,000.00	
31	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	0001 s/d 04	krezet		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000,000.00	
32	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	0001 s/d 0003	infocus in 112		plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	15,525,000.00	
33	02.03.01.02.03	Miibus (Bus penumpang)		Inova	1998 cc	besi	2014	-	MHFXW42G1D2270657	1TR7651773	KH 76	K-02903494 M	Pembelian	268,598,944.00	
34	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda supra x 125	125 cc	Besi	2014	-	MH1JB9135DK461159	7D116730349	KH 5883 AY	K-06648818 M	Pembelian	16,961,464.00	
35	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda supra x 125	125 cc	Besi	2014	-	MH1JB9138DK461169	JB91E3443573	KH 5888 AY	K-05648813 M	Pembelian	16,961,464.00	
36	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda supra x 125	125 cc	Besi	2014	-	MH1JB913XDK451789	JB91E3434729	KH 5798 AY	K-05648527 M	Pembelian	16,961,464.00	
37	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	Honda supra x 125	125 cc	besi	2014	-	MH1JB9131DK464124	JB91E3446116	KH 5875 AY	K-05648804 M	Pembelian	16,961,464.00	
38	2.6.2.7.17	Alat Pemadam Kebakaran	01 s/d 02	honda fire pump		Besi	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	195,000,000.00	
39	02.03.01.03.02	Mobil Hilux	1		2494 CC	Besi	2015	-	MR0FR22G9E0777243	2KDS329309	KH 8702 AW	K-06868484 M	Mutasi	378,648,995.00	
40	02.03.01.03.01	mobil pemadam kebakaran isuzu	1	Isuzu	7790 CC	Besi	2014	-	MHCFVM341EJ000205	6HK1F000063	KH 8691 AW	K-06861658 M	Mutasi	2,475,077,900.00	
41	02.03.01.04.04	mobil pemadam kebakaran Mitsubitsi	1	mitsubitsi	7545 CC	Besi	2014	-	MHMFM517HIR04700	6D16C199349	KH 8006 AW	C 1498553 M	Mutasi	433,959,934.00	
42	2.10.5.1.4	**CCTV**	7	-		plastik / busa	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	25,590,000.00	
43	02.06.04.01.04	meja biro besar esl II	1	-	190 x100 cm	kayu	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	5,900,000.00	
44	02.06.04.03.04	Kursi kerja Esl II	1	-	70 x60 cm	besi	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	4,950,000.00	
45	02.06.04.03.05	Kursi kerja Esl III	3	-	60 x50 cm	besi	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	8,550,000.00	
46	02.06.01.05.39	PERANGKAT DISPLAY	1	infocus	-		2016	-	-	-	-	-	hibah	357,178,805.00	
47	2.6.3.6.1	server data	1	hp prolinant	-		2016	-	-	-	-	-	hibah	265,624,593.00	
48	2.6.3.2.1	PC	4	Dell pc	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	70,661,072.00	
49	02.06.03.02.02	Laptop	1	Hp 14 Ab135 Tx	-	Plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	14,789,527.00	
50	2.6.2.6.3	Televisi 43 "	1	LG 43"	-	Plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	10,270,505.00	
51	2.6.1.5.41	Genset	1	Kipor	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	24,590,522.00	
52	02.06.03.04.08	Printer	1	HP Office 7510A	-	Plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	7,570,829.00	
53	2.6.1.5.10	Framelles glassboard	1	-	-		2016	-	-	-	-	-	hibah	6,397,057.00	

54	02.06.02.04.04	AC	2	Panasonik	2 Pk	plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	27,865,346.00	
55	02.06.02.04.04	AC	2	Panasonik	1 PK	plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	20,118,451.00	
56	02.06.02.04.04	AC	1	Panasonik	1/2 PK	plastik	2016	-	-	-	-	-	hibah	6,772,664.00	
57	-	Meja Operator	6	knoc down	140x70x 75 cm	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	69,722,054.00	
58	-	kabinet Operator	5	knoc down	60x40x6 0 cm	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	31,104,957.00	
59	-	Crenenza/ lemari kayu	1		100x50x 220 cm	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	11,620,342.00	
60	2.6.2.1.10	Meja Rapat	1	PLYWOOD	-	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	29,344,299.00	
61	2.6.4.1.10	meja kerja+meja samping	1	75X70X150	-	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	19,367,237.00	
62	-	kursi hadap	2	KONGSTONE vg	-	besi/b usa	2016	-	-	-	-	-	hibah	12,441,983.00	
63	2.6.1.4.14	Crenenza/ lemari kayu	1			kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	11,855,097.00	
64	2.6.4.1.10	meja meja kerja	1		75X70X 120	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	8,803,290.00	
65	2.6.4.2.11	meja tamu	1		40X50X 110 CM	kayu	2016	-	-	-	-	-	hibah	4,695,088.00	
66	2.6.2.1.49	sofa 1 site	1		-	busa	2016	-	-	-	-	-	hibah	10,857,391.00	
67	2.6.2.1.49	sofa 2 site	1		-	busa	2016	-	-	-	-	-	hibah	22,008,224.00	
68	-	LED TV	2	Sharp	50 "		2015	-	-	-	-	-	hibah	30,869,672.00	
69	02.06.03.06.04	switch Daerah	1	cisco/slm2016T	-		2015	-	-	-	-	-	hibah	6,918,416.00	
70	02.06.03.06.04	Acces point daerah	1	cisco/WAP121	-		2015	-	-	-	-	-	hibah	4,135,746.00	
71	02.06.02.01.10	Meja Rapat	1	CKI/VRS 01A	-		2015	-	-	-	-	-	hibah	22,768,536.00	
72	-	Kursi	11	Donati DO-22	-		2015	-	-	-	-	-	hibah	37,826,646.00	
73	02.06.02.01.73	karpet kantor	1	bl	-		2015	-	-	-	-	-	hibah	4,908,936.00	
74	02.06.01.05.41	Genzet 10 KVA	1	carol/honda	-		2012	-	-	-	-	-	hibah	33,275,000.00	
75	02.06.01.05.40	light tower portable	1	-	-		2013	-	-	-	-	-	hibah	124,602,500.00	
76	-	tenda keluarga	23	-	-		2014	-	-	-	-	-	hibah	376,970,000.00	
77	-	Tenda Pengungsi	10	-			2015	-	-	-	-	-	hibah	690,250,000.00	
78	-	Tenda Keluarga	20	-			2015	-	-	-	-	-	hibah	317,988,000.00	
79	-	Velbed	14	custom			2015	-	-	-	-	-	hibah	12,320,000.00	
80	-	Mesin Pompa Karhutla	5	SHIBURA			2015	-	-	-	-	-	hibah	2,421,650,000.00	
81	02.06.02.07.17	pompa Pemadam sistem Busa	1	ganebo			2016	-	-	-	-	-	hibah	5,087,500,000.00	
82	02.06.02.07.17	Pompa Pemadam Portable	1	ganebo			2016	-	-	-	-	-	hibah	4,136,770,000.00	
83	02.06.02.06.050	Pleksibel Tank 5000 Galon	1	-	(18.927 ltr)		2016	-	-	-	-	-	hibah	45,072,500.00	
84	02.06.02.06.050	Pleksibel Tank 1500 Galon	6	-	5.677 ltr		2016	-	-	-	-	-	hibah	54,450,000.00	
85	02.07.02.01.24	Dual monitor teleprensence	1	polycom	500-720p		2015	-	-	-	-	-	hibah	302,516,906.00	
86	02.07.02.02.04	Radio SSb	1	icom	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	19,425,926.00	

87	-	Gps	2	garmin oregon 650	-		2016	-	-	-	-	-	hibah	15,493,790.00	
88	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	5	Kawasaki	150 CC	Besi	2013	-	MH4LX150CDKP79698	LX150CEPC1861	B.6468 PVQ	K-0399627	hibah	26,873,796.00	
89	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	6	Kawasaki	150 CC	Besi	2013	-	MH4LX150CDKP79708	LX150CEPC1641	B.6469 PVQ	K-04008828	hibah	26,873,796.00	
90	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	1	Kawasaki	150 CC	Besi	2010	-	MH4LX150CAKP19705	LX150CEP28867	KH 2053 AY	Q08295374M	hibah	25,000,000.00	
91	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	2	Kawasaki	150 CC	Besi	2010	-	MH4LX150CAKP19765	LX150CEP28907	B.6842 PNQ	H-08548286	hibah	25,000,000.00	
92	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	3	kawasaki	150 CC	Besi	2015	-	MH4LX150CFJP28214	LX150CEPM5691	B.6777 TQC	M-01894534	hibah	28,061,000.00	
93	02.03.01.05.01	Sepeda Motor (motor trail)	4	kawasaki	150 CC	Besi	2015	-	MH4LX150CFJP28001	LX150CEPM5091	KH 2032 AY	P02937845 M	hibah	28,061,000.00	
94	02.03.01.04.06	Truk Tangki Air(Kendaraan khusus)	1	ISUZU	4570 CC	Besi	2012	-	MHCNKR71HDJ049792	B049792	KH 8921 AW	P02937389 M	hibah	329,888,750.00	
95	02.03.01.01.04	Mobil Pengolah air bersih /Mobil barang	1	ISUZU/NKR 71 HD E2	4570 CC	Besi	2010	-	MHCNK71LYAJO18946	B018946	KH 9094 AW	Q08303022M	hibah	409,500,000.00	
96	02.03.01.04.22	Mobil Komando/Mobil barang	1	MITSUBISHI /STRA CR25AGLS (4X4) DC	2477 CC	Besi	2011	-	MMBJNKB40CD04937	4D56UCCY0784	B.9474 PSC	H-06701747	hibah	396,990,000.00	
97	02.03.01.03.05	Mobil truk serba guna/Mobil barang	1	ISUZU/NKR 71 HD E2-1	4570 CC	Besi	2011	-	MHCNK71LYBJO27508	B027508	KH 8920 AW	P02937384 M	hibah	420,387,000.00	
98	02.03.01.04.01	Mobil Ambulance/Mobil penumpang	1	ISUZU/NKR 55.CO E2-1	2771 CC	Besi	2011	-	MHCNK55EYBJO40369	MO40369	KH 9091 AW	P02937382 M	hibah	384,120,000.00	
99	02.03.01.04.06	Mobil Tangki Air	1	isuzu/NKR71 HD 6.1		Besi	2016	-	MHCNMR71HGJ075737	BO75737	KH 8922 AW	P02937390 M	hibah	363,055,000.00	
100	02.03.01.04.22	Truk dapur Umum/Mobil barang	1	MITSUBISHI /C.DIS FE74HDV4X2 MT	3908 CC	Besi	2010	-	MHMFE74P5AK036041	4D34TF81010	KH 8919 AW	P02937383 M	hibah	448,403,882.00	
101	02.03.04.02.01	perahu polyteline	2		-	karet	2015	-	-	-	-	-	hibah	266,761,000.00	
102	02.03.03.03.11	mesin perahu kap 9,8 pk	2		-	karet	2015	-	-	-	-	-	hibah	41,030,000.00	
103	02.03.03.03.11	perahu lipat 3,85 m	1	portabote	-	karet	2015	-	-	-	-	-	hibah	89,650,000.00	
104	02.03.03.03.11	mesin perahu 40 pk	1		-	besi	2013	-	-	-	-	-	hibah	78,661,000.00	
105	02.03.03.03.11	mesin perahu kps 25 pk	1		-	besi	2012	-	-	-	-	-	hibah	35,917,200.00	
106	02.03.03.03.11	mesin perahu 40 pk	1		-	besi	2012	-	-	-	-	-	hibah	78,400,300.00	
107	02.06.03.04.08	printer canon	1	pixma G4000				-	-	-	-	-	Pemmbelian	4,137,273.00	
108	02.06.03.04.08	printer Hp	1	Hp officejet 7612				-	-	-	-	-	Pemmbelian	3,980,727.00	
109	02.04.01.06.01	mesin chinsaw	2	sthill			2017	-	-	-	-	-	hibah	3,354,545.00	
110	02.06.01.05.43	pompa punggung	15				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	47,126,745.00	
111	02.06.02.07.02	pompa Pemadam MK-3	2				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	156,000,000.00	
112	02.06.02.06.32	Tiang Bendera	1				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	5,000,000.00	
113	02.06.02.06.32	Tiang Spanduk	1				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	5,000,000.00	
114	02.06.01.05.17	mesin absensi sidik jari	1	newmark			2017	-	-	-	-	-	pengadaan	1,418,182.00	
115	02.06.04.01.05	meja kerja biro esl III	4			kayu	2017	-	-	-	-	-	pembelian	15,600,000.00	

116	02.06.04.01.06	meja kerja biro esl IV	9			kayu	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	27,450,000.00	
117	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Esl III	1				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	2,800,000.00	
118	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Esl IV	1				2017	-	-	-	-	-	pengadaan	1,300,000.00	
119	02.06.03.02.02	Laptop core i7	4	lenovo	i 7	Plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	40,000,000.00	
120	02.06.03.03.06	UPS	3	ICA	-	plat	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	11,700,000.00	
121	02.06.03.02.01	Personal Komputer(Pc)	3	hp	-	plat	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	30,000,000.00	
122	02.06.03.04.08	Printer	2	epson	L455	plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	10,000,000.00	
123	02.06.02.04.04	Ac split 2 pk	4	lg	2pk	plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	52,000,000.00	
124	02.06.02.04.04	Ac split 1,5 pk	1	lg	1,5 pk	plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	6,000,000.00	
125	02.07.01.01.82	Drone	2	-		plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	75,000,000.00	
126	02.06.02.06.03	televisi	1	lg	32 inch	plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	5,000,000.00	
127	02.10.05.01.04	cctv	8	-	-	plastik	2017	-	-	-	-	-	pengadaan	22,000,000.00	
128	02.07.02.01.014	Handy Talky	10	Icoom v88		plastik	2018		-	-	-	-	pengadaan	38,000,000.00	
129	02.07.02.01.023	Smart Phone	5	samsung	s5	plastik	2018		-	-	-	-	pengadaan	24,500,000.00	
130	02.07.02.01.021	*HP Android*	3	*samsung*	*s9*	plastik	2018		-	-	-	-	pengadaan	48,000,000.00	
131	02.06.03.02.01	Komputer core i7	1s/d 6	lenovo	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-		99,000,000.00	
132	02.06.03.02.01	Komputer core i5	1	hp	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	14,500,000.00	
133	02.06.03.02.02	Laptop core i7	1 s/d 2	Acer	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	28,000,000.00	
134	02.06.03.04.08	Printer	1 s/d 2	Brother	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	9,600,000.00	
135	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	1		-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	13,500,000.00	
136	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1 s/d 2	honda	35.8	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	9,800,000.00	
137	02.06.02.04.03	AC Split	1 s/d 2		1.5 pk	Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	11,800,000.00	
138	02.06.02.06.37	Tangga Lipat 3,43 M	1		3.43 m	Aluminium	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	1,300,000.00	
139	02.06.02.06.37	Tangga Lipat 5 M	1		5 m	Aluminium	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	3,100,000.00	
140	02.03.02.01.02	Gerobak dorong	1	arco		Plat/Besi	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	617,500.00	
141	02.06.03.04.08	Printer bidang 2	1 s/d 2	epson		Plastik	2018	-					pengadaan	6,000,000.00	
142	02.06.02.06.51	Tandon Air	1	arwana		Plastik	2018	-					pengadaan	5,000,000.00	
143	02.10.05.01.04	CCTV	1			Plastik	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	6,270,000.00	
144	02.04.01.06.01	chinsaw	1 s/d 3	sthill	250	besi	2018	-					pengadaan	21,750,000.00	
	02.03.01.04.22	Mobil Komunkasi / UBAH	1	hino		BESI	2018	-	MJEC1JGX1C5010055	W04DTPJ29259	B 9545 PQU	J-01003178	hibah	2,264,192,700.00	
146	02.02.01.10.05	forkliift	1	caterpillar		BESI	2015	-	-	-	-	-	hibah	244,368,000.00	
147	02.07.02.04.04	Bts Tetra	1			Plastik	2014	-	-	-	-	-	hibah	2,825,790,000.00	

148	02.07.02.04.04	Moble Tetra radio	1			Plastik	2014	-	-	-	-	-	hibah	60,225,000.00	
149	02.07.02.04.04	Analogue{Rig VHF+SSB-HF)	1			Plastik	2014	-	-	-	-	-	hibah	46,814,900.00	
150	02.07.02.04.04	Radio Gateway(4 port)	1			Plastik	2014	-	-	-	-	-	hibah	1,044,780,000.00	
151	02.07.02.04.04	Gsm Router	1			Plastik	2014	-	-	-	-	-	hibah	189,750,000.00	
152	02.06.02.07.02	pompaj injing	1			besi	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	32,700,000.00	
153	02.06.02.07.17	Alat Pemadam Kebakaran	1	Paket		besi	2018	-	-	-	-	-	pengadaan	5,850,000.00	
154	02.06.02.07.016	Tabung Apar 6 kg	25	-	-	besi	2019		-	-	-	-	pengadaan	21,875,000.00	
155	02.06.02.07.02	Mesin Honda GXH 50 Mini Striker	6	Honda	-	besi	2019		-	-	-	-	pengadaan	210,000,000.00	
156	02.06.02.07.02	Mesin Honda GXH 50 Mini Striker	10	Honda	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	350,000,000.00	
157	02.06.02.07.02	Pompa Air	7	Robin	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	30,800,000.00	
158	02.06.02.07.02	Pompa Pemadam	2	Honda	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	62,000,000.00	
159	02.06.02.06.039	dispenser	5	Miyako	-	plastik	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	6,000,000.00	
160	02.06.03.04.010	Scaner	1	epson	-	plastik	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	15,812,500.00	
161	02.06.02.07.02	Mesin Pompa apung	2	Honda	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	13,310,000.00	
162	02.06.02.07.02	*Mesin Pompa Karhutla (M)*	1	Honda	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	253,330,000.00	
163	02.06.02.07.02	Mesin Pompa Karhutla (R)	1	Honda	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	238,370,000.00	
164	02.03.01.04.005	mobil toilet	1	Isuzu	-	besi	2012	-	MHCNK71LYCJ040037	B040037	KH 9095 AW	Q08303023 M	hibah	741,070,000.00	
165	02.03.01.04.022	Mobil Komando	1	Isuzu	-	besi	2018	-	MPATFS86JJT005831	SK4509	B 9361 TSC	-	hibah	486,750,000.00	
166	02.06.01.05.040	Toilet Portable	1	-	-	besi	2018	-	-	-	-	-	hibah	147,650,000.00	
167	02.06.02.01.047	Tenda Sekolah	2	-	-	besi	2018	-	-	-	-	-	hibah	363,000,000.00	
168	02.06.02.07.016	Pompa Pemadam Karhutla(	10	Honda	-	besi	2018	-	-	-	-	-	hibah	1,941,500,000.00	
169	02.06.02.07.02	Mesin Pompa Karhutla (R)	2	Honda	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	476,740,000.00	
170	02.06.02.07.02	Mesin Pompa apung	2	Honda	-	besi	2016	-	-	-	-	-	hibah	13,310,000.00	
171	02.06.01.05.040	light tower portable	1	-	-	besi	2017	-	-	-	-	-	hibah	251,350,000.00	
172	02.06.01.05.043	Mesin Pompa Air	15	-	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	66,750,000.00	
173	02.06.02.06.050	Portable Tank	30	-	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	73,500,000.00	
174	02.06.02.06.051	Tandon 750 Liter	5	-	-	plastik	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	6,750,000.00	
175	02.06.02.03.001	Air Purifier Smoke	16	-	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	192,000,000.00	
176	02.06.02.07.016	Tabung Oksigen Trolly	5	-	-	Plat	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	6,000,000.00	
177	02.07.01.01.082	DRONE	1	-	-	plastik	2019	-		-	-	-	pengadaan	49,950,000.00	
178	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	5	Viar	-	besi	2019	-	MGRVR20TAKL207127	YX200FMG19206851	KH 3530 TY	PO6122602M	pengadaan	38,995,900.00	
179	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	6	Viar	-	besi	2019	-	MGRVR20TAKL207072	YX200FMG19206515	KH 3531 TY	PO6122603M	pengadaan	38,995,900.00	
180	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	7	Viar	-	besi	2019	-	MGRVR20TAKL207076	YX200FMG19206518	KH 3532 TY	PO6122604M	pengadaan	38,995,900.00	

181	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	8	Viar	-	besi	2019	-	MGRVR20TAKL207031	YX200FMG19206337	KH 3534 TY	PO6122 605M	pengadaan	38,995,900.00	
182	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	9	Viar	-	besi	2019	-	MGRVR20TAKL207082	YX200FMG19206512	KH 3536 TY	PO6122 606M	pengadaan	38,995,900.00	
183	02.06.02.07.016	Tabung Oksigen Portable	5	-	-	besi	2019	-	-	-	-	-	pengadaan	12,500,000.00	
184	02.07.01.01.87	proyektor/infocus	1	epson/INFOCUS	EB-x450	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	8,360,000.00	
185	02.07.02.02.04	speker aktif	1	polytron/pas pro12f2	A1401	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	6,765,000.00	
186	02.06.03.02.01	PC all in one	1	Asus	17 "	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	8,415,000.00	
187	02.06.03.02.02	Laptop	1	Asus	!5 "	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	17,391,000.00	
188	02.06.03.04.08	Printer	2	Brother	Dpc T510W	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	6,930,000.00	
189	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	1	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO393	163FMLL1178690	KH 3608 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
190	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	2	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO381	163FMLL1339488	KH 3609 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
191	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	3	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO250	163FMLL1339410	KH 3610 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
192	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	4	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO361	163FMLL1339499	KH 3611 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
193	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	5	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO300	163FMLL1339422	KH 3612 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
194	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	6	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO385	163FMLL1339463	KH 3613 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
195	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	7	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO411	163FMLL1339449	KH 3614 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
196	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	8	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO390	163FMLL1339474	KH 3615 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
197	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	9	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO249	163FMLL1339412	KH 3616 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
198	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	10	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO282	163FMLL1339403	KH 3617 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
199	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	11	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO244	163FMLL1339405	KH 3618 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
200	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	12	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO220	163FMLL1178626	KH 3619 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
201	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	13	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO251	163FMLL1339473	KH 3620 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
202	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	14	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO230	163FMLL1339454	KH 3621 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
203	02.03.01.06.003	Kendaraan roda 3	15	NOZOMI	-	besi	2020	-	MGZB4TMAHLJOOO387	163FMLL1178698	KH 3623 TY	-	pengadaan	65,000,000.00	
204	02.03.01.03.02	Mobil Hilux	2	toyota all new	-	besi	2020	-	MROEB8BB0L0051100	2GD0839531	KH 8025 TW	Q08273827 M	pengadaan	244,000,000.00	
205	02.03.01.04.22	truk dapur umum	1		-	besi	2020	-	MHCNMR71HLJ115547	B115547	KH 9067 AW	QO8285 911 M	pengadaan	570,000,000.00	
206	02.03.01.04.22	truk dapur umum	1		-	besi	2020	-	MHCNMR71HLJ115548	B115548	KH 9069 AW	QO8285 910 M	pengadaan	570,000,000.00	
207	02.03.01.04.06	mobil tangki Air	1		-	besi	2020	-	MHCNMR71HLJ115549	B115549	KH 8035 TW	QO8285 912 M	pengadaan	550,000,000.00	
208	02.06.02.01.01	llemari arsip	1		-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	9,875,000.00	
209	02.07.02.02.04	sound sisten dan Kelengkapannya	1		-	besi	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	15,000,000.00	
210	02.07.01.01.082	drone	2		-	plastik	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	393,600,000.00	
211	02.06.02.07.016	Tabung Apar 6 kg	5	-	-	besi	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	4,500,000.00	
212		handspary mesin gendong	10	-	-	besi	2020	-	-	-	-	-	pengadaan	31,250,000.00	
213	02.06.01.05.043	MESIN POMPA AIR		Robin n 300		besi	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	9,570,000.00	

214	02.03.03.03.11	Perahu Karet		-		Karet	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	98,800,000.00	
215	02.06.02.01.067	pengadaan Horden		-		kain	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	**149,000,000.00**	
216	02.03.01.04.06	Mobil Truck Aftur B 9230 TMA		WU342RMKMTJD3 MT	4009 CC	besi	2021	-	MJEC1JG43K5185216	W04DTRR74902	B9230 TMA	P-07463120	HIBAH	561,000,000.00	
217	02.03.01.04.22	Mobil L 300		mitsubitsi		besi	2021	-	-	-	-	-	HIBAH	178,232,700.00	
218		Radoi sisitem Stasiun wilayah		-		besi	2021	-	-	-	-	-	HIBAH	2,121,559,000.00	
219	02.06.03.02.001	PC		hp		Plastik	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	49,110,769.23	
220	02.06.03.02.002	Laptop		aser		Plastik	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	35,969,076.92	
221	02.06.03.04.008	Printer		epson		Plastik	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	31,606,153.85	
222	02.03.03.03.11	PERAHU KARET		-		Karet	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	163,754,250.00	
223	02.03.03.03.11	PERAHU KARET		-		Karet	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	98,258,875.00	
224	02.03.03.03.11	PERAHU KARET		-		Karet	2021	-	-	-	-	-	pengadaan	110,308,000.00	
225	02.06.04.03.06	kursi kerja	1/sd 21	-	esl IV	Besi/Busa	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	51,859,500.00	
226	02.06.02.01.10	meja kerja rapat	1/sd 15	-		Kayu	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	29,370,000.00	
227	02.06.04.03.05	kursi esl	1 sd 5	-	esl III	Besi/Busa	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	9,680,000.00	
228	02.02.02.04.001	Troli untuk perahu karet	1	-	-	Besi	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	33,150,000.00	
229	02.02.02.04.001	Troli untuk mesin Busa	2	-	-	Besi	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	54,300,000.00	
230								-	-	-	-	-			
231	02.10.01.02.002	laptop	1 s.d 4				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	67,300,000.00	
232	02.05.02.04.004	Ac uk 2,pk	1 s.d 4				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	38,100,000.00	
233	02.05.02.04.006	kipas angin	2				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000,000.00	
234	02.05.03.07.007	lemari arsip	24				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	119,746,800.00	
235	02.10.02.03.003	printer	2				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	11,520,000.00	
236	02.05.01.04.003	Rak besi	24				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	199,000,800.00	
237	02.02.03.03.036	**Perahu karet + Mesin**	1				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	132,974,830.00	
238	02.02.03.03.036	**Perahu karet + Mesin**	1				2022	-	-	-	-	-	Pembelian	134,251,330.00	
		JUMLAH SAMPAI DENGAN 31 des TAHUN 2022												44,577,226,355.00	
239	02.10.02.05.001	vidio konfrence				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	28,500,000.00	
240	02.06.03.04.08	printer epson 15290		Epson		Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	8,200,000.00	
241	02.06.03.04.08	epson 11800		Epson		Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	12,400,000.00	

242	02.06.03.02.01	Pc all In one				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	36,800,000.00	
243	02.06.03.02.002	laptop acer nitro 5 AN515		acer		Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	26,600,000.00	
244	02.07.01.01.01	kamera epson eos 1500D	epson eos		1500D	Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	11,200,000.00	
245	02.05.02.04.004	AC uk 1/2 pk				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	21,100,000.00	
246	02.05.02.04.004	AC uk 1 pk				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	22,400,000.00	
247	02.06.02.01.27	Kursi rapat				busa	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	19,950,000.00	
248	02.02.03.03.036	Perahu karet + mesin				Fiber .besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	98,600,000.00	
249	02.05.01.05.088	mesin potong shincaw				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	9,500,000.00	
250	02.05.02.07.016	tabung oksigen aluminium portable				besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500,000.00	
251	02.05.02.04.004	AC Panasonic		Panasonic		Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	11,195,000.00	
252	02.05.02.04.001	KULKAS SHARP 2 PINTU 195 MN		SHARP	2 PINTU 195 MN	Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	5,500,000.00	
253	02.10.01.02.002	LAPTOP		AXIOO PONGO	760	Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	43,300,000.00	
254	02.10.01.02.001	PC AIO		ACER	C24-1700	Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	94,000,000.00	
255	02.10.02.03.003	Printer		EPSON	L6290	Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	6,160,000	
256	02.06.01.06.001	PAKET SOUND SYSTEM				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	39,400,000.00	
257	02.10.01.02.009	pc tablet				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	18,640,000.00	
258	02.10.02.03.018	UPS		ica	ct 682B	Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	13,590,000.00	
259	02.10.02.03.003	PRINTER				Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	16,600,000.00	
260	02.10.02.02.009	SCANNER				Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	8,100,000.00	
261	02.05.02.04.001	KULKAS SHARP 2 PINTU 195 MN		SHARP	2 PINTU 195 MN	Besi	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	2,750,000.00	
262	02.10.02.05.001	**pc deskop (all in one)Hp 200**				Besi	2023	-	-	-	-	-	Hibah	21,600,000.00	
263	02.10.02.05.001	**headset poly blabkwire c3215**				Besi	2023	-	-	-	-	-	Hibah	2,500,000.00	
264	02.10.02.04.002	**Microtik router,RB951UI-2HDN**				Plastik	2023	-	-	-	-	-	Hibah	1,100,000.00	
265	02.10.02.03.018	**APC easy UPS**				Besi	2023	-	-	-	-	-	Hibah	1,300,000.00	

	PENERIMAAN BARANG TAHUN 2023													585,485,000.00	
	JUMLAH BMD SD 31 DES 2023													45,162,711,355.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1	MITSUBISHI / pajero/penumpang	2477 cc	besi	2024		MK2KSWPNUPJ002191	4N15UKJ5061	KH 1650 AU	U-01989434M	Pembelian	752,000,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	2	2.0 G HV CVT		besi	2024		MHFA8AAA7R0018783	M20ANB71977	KH 1668 AU	U06700780M	Pembelian	481,100,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	3	toyota / rush	1500 cc	besi	2024		MHKE8FA3JRK112384	2NR4C20878	KH 1664 AU	U06700777 M	Pembelian	307,900,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	4	toyota / rush	1500 cc	besi	2024		MHKE8FA3JRK112393	2NR4C21511	KH 1663 AU	U06700776 M	Pembelian	307,900,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	5	toyota / rush	1500 cc	besi	2024		MHKE8FA3JRK112343	2NR4C21205	KH 1667 AU	U06700778 M	Pembelian	307,900,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	6	toyota / rush	1500 cc	besi	2024		MHKE8FA3JRK112319	2NR4C20365	KH 1665 AU	U06700778 M	Pembelian	307,900,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	7	MITSUBISHI / 4 x4 (KENDARAAN KHUSUS	2477 CC	besi	2024		MMBENKL30RH022526	4D56UBM4398	KH 8194 TW	V00152636M	Pembelian	615,000,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	8	MITSUBISHI / 4 x4 (KENDARAAN KHUSUS)	2477 CC	besi	2024		MMBENKL30RH022444	4D56UBM4381	KH 8193 TW	V00152635M	Pembelian	615,000,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	9	-		BESI	2024		JTFST22PXR0047496	IKDB193321	KH 7593 AU	V04173817	Pembelian	581,900,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	12			BESI	2024		MMBENKL30PH088007	4D56UBL3931	KH 9160 AW	V00023041M	Pembelian	615,000,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	13			BESI	2024		MMBENKL30PH090250	4D56UBL5163	KH 9159 AW	V00023040M	Pembelian	615,000,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	14	TOYOTA		BESI	2024		MROKB8CDOR1149761	26DD382820	KH 8160 TW	U06700775M	Pembelian	477,500,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	15	TOYOTA		besi	2024		MROKB8CDXR1222649	26D5582964	KH 8183 TW	V00023257M	Pembelian	477,500,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	16	toyota / HILUX DOUBLE CABIN	2400 cc	besi	2024		MRDKB8CD6R1222762	26D5585644	KH 8185 TW	V00023261M	Pembelian	477,500,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	17	toyota		besi	2024		MROKB8CDXR1152781	26DD429093	KH 8230 TW	V04713160	Pembelian	479,800,000.00	
	02.02.01.02.005	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	18	toyota			2024		MROKB8CD2R1223830	26DD431050	KH 8231 TW	V04713161	Pembelian	479,800,000.00	
	02.02.01.03.002	Pick Up	5	SUZUKI	1462 CC	besi	2024		MHYHDC61TPJ246977	K15BT1574074	KH 8178 TW	U-06711479	Pembelian	200,000,000.00	
	02.02.01.03.002	Pick Up	6	SUZUKI	1462 CC	besi	2024		MHYHDC61TPJ249399	K15BT1579392	KH 8177 TW	U-06711478	Pembelian	200,000,000.00	
	02.02.01.03.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2	-		besi	2024		MHMFE75EKRK022060	4V21U51020	KH 8201 TW	V00153462M	Pembelian	591,000,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	19	honda		besi	2024		MH1JM8224RK087189	JM82E2087979	KH 4567 TY	U-06701961M	Pembelian	19,690,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	20	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1114RK486656	KD11E1485961	KH 4566 TY	U-06701960M	Pembelian	36,290,000.00	

	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1110RK480045	KD11E1479332	KH 4568 TY	U-06701962M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	22	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1118RK481413	KD11E1480644	KH 4570 TY	U-06701964M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	23	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1112RK480046	KD11E1479333	KH 4569 TY	U-06701963M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1112RK485215	KD11E1484453	KH 4562 TY	U-06701956M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	25	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1118RK486644	KD11E1485417	KH 4563 TY	U-06701957M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1119RK485244	KD11E1484431	KH 4561 TY	U-06701955M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	27	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1110RK486640	KD11E1485851	KH 4564 TY	U-06701958M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	honda / crf 150 l	150 cc	besi	2024		MH1KD1112RK486560	KD11E1485867	KH 4565 TY	U-06701959M	Pembelian	36,290,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	29	honda / fcx	150	besi	2024		MH1KF6115RK319239	KF81E1318968	KH 4571 TY	U-06702400M	Pembelian	36,495,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	30	-		besi	2024		MK511111ONJ003555	MK5111112000420	B 5024 TWQ	SO6025801	HIBAH	33,022,594.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	31	honda / trail		besi	2024		MH1KD1113RK548287	KD11E1547550	KH 4649 TY	U-04705888	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	32	honda / trail		besi	2024		MH1KD1116RK549224	KD11E1548433	KH 4650 TY	U-04705889	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	33	honda / trail		besi	2024		MH1KD111RK549258	KD11E1548480	KH 4651 TY	U-04705890	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	34	honda / trail		besi	2024		MH1KD111RK549265	KD11E1548487	KH 4652 TY	U-04705891	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	35	honda / trail		besi	2024		MH1KD111RK549284	KD11E1548501	KH 4653 TY	U-04705892	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	36	honda / trail		besi	2024		MH1KD111RK549297	KD11E1548517	KH 4654 TY	U-04705893	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	37	honda / trail		besi	2024		MH1KD1119RK549301	KD11E1548520	KH 4655 TY	U-04705894	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	38	honda / trail		besi	2024		MH1KD1119RK548231	KD11E1547495	KH 4656 TY	U-04705895	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	39	honda / trail		BESI	2024		MH1KD1119RK548200	KD11E1547467	KH 4657 TY	U-04705896	Pembelian	37,350,000.00	
	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	2	-		BESI	2024		MJECCB2F7R5020221	N04CWYJ30394	KH 9189 AW	V00173171M	Pembelian	1,735,000,000.00	
	02.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	3	-		BESI	2024		MJECCB2F5R5020220	N04CWYJ30393	KH 9188 AW	V00173170M	Pembelian	1,735,000,000.00	
	02.02.01.06.005	Mobil Tinja	2	-		camp uran	2024		MHCNMR81HRJ122856	4HL1G122856	KH 9184 AW	V00172631M	Pembelian	1,188,250,000.00	
	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	5	Hino / Mobil Water Supply	500L	camp uran	2024		MJECCB2F0R5020223	N04CWYJ30401	KH N9187 AW	V00173169M	Pembelian	964,700,000.00	

	02.02.01.06.006	Mobil Tangki Air	6	Hino / Mobil Water Supply	500L	besi	2024		MJECCB2F2R5020224	N04CWYJ30402	KHN 9186 AW	V00173168M	Pembelian	964,700,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	5	-		besi	2024						Pembelian	1,400,000,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	6	-		BESI	2024		MJECCA4F3R5022216	N04CWVJ16191	KH 8234 TW	V04726124M	Pembelian	7,900,000,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	7	-		BESI	2024		MHCNMR81LRJ123520	4HL1G123520	KH 9185 AW	V00172632M	Pembelian	1,049,250,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	8	TOYOTA		BESI	2024						Pembelian	964,000,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	9	-		camp uran	2024		MMBENKL30RH022527	4D56UBM4402	KH 9163	V00152637M	Pembelian	1,265,000,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	10	-		camp uran	2024		MJECCB2F9R5020169	N04CWYJ30260	KH 9192	V04713170M	Pembelian	964,500,000.00	
	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	11	-		besi/fiber	2024		MJECCB2F9R5020222	N04CWYJ30395	KH 9190	V04713169M	Pembelian	964,500,000.00	
	02.02.03.03.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	20	-		plastik	2024		-	-	-	-	Pembelian	2,102,500,000.00	
	02.02.03.03.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	21	-		plastik	2024		-	-	-	-	Pembelian	106,400,000.00	
	02.02.03.03.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	22	-		plastik	2024		-	-	-	-	Pembelian	106,400,000.00	
	02.02.03.03.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	23	-		besi	2024		-	-	-	-	Pembelian	106,400,000.00	
	02.05.01.04.003	Rak Besi	25 s.d 39	-		besi	2024						Pembelian	119,100,000.00	
	02.05.01.04.015	Locker	1 s.d 7	-		besi	2024						Pembelian	32,200,000.00	
	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1	krisbrow		plastik	2024						Pembelian	8,000,000.00	
	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	- / lcd		plastik	2024						Pembelian	3,800,000.00	
	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	3	epson tw 6250 / -		camp uran	2024						Pembelian	25,200,000.00	
	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	4	Toshiba / Toshiba 433 c350 NP LED inchh		camp uran	2024						Pembelian	8,200,000.00	
	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	83 s.d 114	-		plastik	2024						Pembelian	691,200,000.00	
	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	115 s.d 117	-		plastik	2024						Pembelian	63,600,000.00	
	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	118	samsung		plastik	2024						Pembelian	21,200,000.00	
	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	121	-		plastik	2024						Pembelian	21,200,000.00	
	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	119 ss.d 120	krisbow s8106		plastik	2024						Pembelian	16,000,000.00	

	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	122 s.d 125	-		plastik	2024						Pembelian	226,800,000.00	
	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	23	- / -		kayu	2024						Pembelian	30,000,000.00	
	02.05.02.01.008	Meja Rapat	53	-		kayu	2024						Pembelian	21,670,000.00	
	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	33s.d 122	-		besi/busa	2024						Pembelian	296,550,000.00	
	02.05.02.01.048	Sofa	8 s.d 9	-		busa	2024						Pembelian	41,000,000.00	
	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	4 s.d 6	-		besi	2024						Pembelian	6,480,000.00	
	02.05.02.06.002	Televisi	20	samsung		plastik	2024						Pembelian	15,500,000.00	
	02.05.02.06.008	Sound System	3 s.d 5	-		plastik	2024						Pembelian	160,500,000.00	
	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	1 s.d 2	UPS		campuran	2024						Pembelian	6,600,000.00	
	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	3	UPS		campuran	2024						Pembelian	3,300,000.00	
	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	247 s.d 251	-		plastik	2024						Pembelian	375,000,000.00	
	02.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	58 s.d 117	onga gx 160		besi	2024						Pembelian	1,620,000,000.00	
	02.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	118 s.d 152	onga gx160		besi	2024						Pembelian	875,000,000.00	
	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	-		busa	2024						Pembelian	10,880,000.00	
	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	4 s.d 6	-		plastik	2024						Pembelian	23,100,000.00	
	02.06.01.02.130	Video Conference	1	webcame logitech		campuran	2024						Pembelian	31,400,000.00	
	02.06.01.02.130	Video Conference	3 s.d 4	logitech / video conference		campuran	2024						Pembelian	62,800,000.00	
	02.06.01.05.038	GPS Receiver	1 s.d 2	Gps garmin		campuran	2024						Pembelian	19,300,000.00	
	02.06.01.05.038	GPS Receiver	3 s.d 4	GPS Garmin / 86s		campuran	2024						Pembelian	18,980,000.00	
	02.06.01.05.038	GPS Receiver	5	GPS MAP		campuran	2024						Pembelian	6,350,000.00	
	02.06.01.05.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	1	-		plastik	2024						Pembelian	124,500,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	4 s.d 7	epson / TW-6250		plastik	2024						Pembelian	115,200,000.00	

	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	8 s.d 11	samsung / Q LED		plastik	2024						Pembelian	658,800,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	12 s.d 21	firstcom fc-22OR / HT		plastik	2024						Pembelian	18,500,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	22	-		plastik	2024						Pembelian	2,500,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	23	-		plastik	2024						Pembelian	24,900,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	24	sony A7S II		plastik	2024						Pembelian	61,995,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	25	Sony		plastik	2024						Pembelian	38,000,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	26	NIKON / D500		plastik	2024						Pembelian	28,700,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	27 s.d 28	FE 20-70MMSEL 2070G		plastik	2024						Pembelian	46,000,000.00	
	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	29	lensa camera digital / een-226447513		campuran	2024						Pembelian	24,900,000.00	
	02.07.01.01.039	Bed Skreen/Sherm	1 s.d 32	-		kain dan besi	2024						Pembelian	87,680,000.00	
	02.10.01.02.001	P.C Unit	54	AIO ASUS		Plastik	2024						Pembelian	18,200,000.00	
	02.10.01.02.001	P.C Unit	55	IO HP-PC 24		plastik	2024						Pembelian	21,600,000.00	
	02.10.01.02.001	P.C Unit	56 s.d 58	AIO ASUS		PLASTIK	2024						Pembelian	54,750,000.00	
	02.10.01.02.001	P.C Unit	59 s.d 62	AIO Asus		PLASTIK	2024						Pembelian	131,600,000.00	
	02.10.01.02.001	P.C Unit	63 s.d 64	AIO Asus		PLASTIK	2024						Pembelian	50,800,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	1	lenovo		plastik	2024						Pembelian	23,900,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	2 s.d 3	Lenovo		plastik	2024						Pembelian	57,400,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	4 s.d 5	lenovo		plastik	2024						Pembelian	43,800,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	6	Asus		PLASTIK	2024						Pembelian	71,850,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	9 s.d 11	Asus TUF F15FX507VI		PLASTIK	2024						Pembelian	86,250,000.00	
	02.10.01.03.001	Komputer Unit Lainnya	12 s.d 16	Asus VIVOBOOK		PLASTIK	2024						Pembelian	102,750,000.00	
	02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	pc asusAIO A5402WVAT		plastik	2024						Pembelian	25,400,000.00	

	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 s.d 10	epson / DS-410		plastik	2024						Pembelian	86,500,000.00	
	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11 s.d 12	epson / L6290		plastik	2024						Pembelian	17,300,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	4	asus / rog strikx G13 CH		plastik	2024						Pembelian	32,500,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	5	asus		plastik	2024						Pembelian	32,340,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	6 s.d 8	asus		plastik	2024						Pembelian	70,200,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	9	epson ds-1630		plastik	2024						Pembelian	8,650,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	10 s.d 11	epson		plastik	2024						Pembelian	17,000,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	12	epson ds-410		plastik	2024						Pembelian	8,100,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	13	-		plastik	2024						Pembelian	4,330,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	14	epson ds-60 W		plastik	2024						Pembelian	4,490,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	15	Epson / DS 6500		plastik	2024						Pembelian	21,200,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	16.s.d 17	EPSON / DS-410		plastik	2024						Pembelian	17,200,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	18 s.d 21	EPSON / DS-410		plastik	2024						Pembelian	34,400,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	22	-		plastik	2024						Pembelian	15,000,000.00	
	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	23 s.d 24	SAMSUNG / galaksy tab S9		camp uran	2024						Pembelian	42,000,000.00	
	02.16.01.03.001	alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya lainnya (dst)	1 s.d 3	SCBA		camp uran	2024						Pembelian	130,470,000.00	
*	JUMLAH PENERIMAAN TAHUN 2024													40,480,832,594.00	
*	JUMLAH KIB B THAUN 2024													85,643,543,949.00	

Sumber : Data Aset Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah s.d Tahun 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana adalah satu perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya pengurangan risiko bencana periode 2021 s.d tahun 2024 antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

a. Tersusunnya Kajian Risiko Bencana (KRB);
b. Tersosialisasinya daerah rawan bencana dengan kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS);

c. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
d. Terpenuhinya penambahan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan pembentukan dan penambahan komunitas PB;
e. Memaksimalkan wilayah rawan bencana yang terpasang early warning system (EWS) dan rambu jalur evaluasi;
f. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA);
g. Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi (Renkon) perjenis bencana;
h. Terfasilitasinya penambahan kapasitas gladi kesiapsiagaan bencana.

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Simulasi dan Gladi Penanganan Darurat Bagi masyarakat/relawan;
b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
c. Gubernur mengajar dalam penanganan dan pengenalan bencana bagi pelajar;
d. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR melaksanakan, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana;
e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/ 7 hari selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

a. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/ musiman terjadi di Kalimantan Tengah;
b. Memaksimalakan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
c. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment dan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA). Melatih apatarur pemerintah agar mampu melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga laporan dampak bencana disertai kerusakan dan kerugian;
d. Sinergi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana di Kalimantan Tengah.

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

a. Pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencna dalam hal penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
b. Koordinasi, Konsolidasi Logistik Bencana; dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas sosial sebagai liding sektor pemenuhan dasar masyarakat terdampak pada pengungsian serta kab/kota.
c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB disetiap instansi sebagai bentuk kapasitas peralatan dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah.
d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana merupakan upaya peningkatan kapasitas peralatan dan

kelembagaan serta sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan yang akan dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Bpbd Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 S.D 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
I	ASPEK PLAYANAN UMUM												
A	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
	Indeks Resiko Bancana				130	129	128	123.25	121.72	121.72	105.48	105.98	105.16
B	Indikator Kinerja Daerah (IKD)												
	Tingkat Indeks Ketahanan Daerah				3.3	3.4	3.5	3.35	3.45	3.45	98.51	98.55	101.45
C	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
	Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
1	Persentase Penanganan Pra Bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya fungsi kelembagaan				12	12	12	12	12	12	100	100	12
6	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompoten				10	10	10	10	10	10	100	100	10
7	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran				100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

BBPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	9,254,235,977	9,532,639,615	10,032,329,096	61,188,088,516	7,809,105,004	7,591,724,470	9,167,588,738	59,827,606,545	84.38	79.64	91.38	97.78
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	1,903,709,200	1,260,000,000	21,747,086,000	38,661,531,189	1,741,101,502	1,167,040,463	20,891,293,427	36,962,730,197	91.46	92.62	96.06	95.61
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	45,764,000	240,167,000	865,580,000	877,721,374	30,362,300.00	224,541,314	793,776,549	786,922,148	66.35	93.49	91.70	89.66
	Jumlah	**11,203,709,177**	**11,032,806,615**	**32,644,995,096**	**100,727,341,079**	**9,580,568,806.00**	**8,983,306,247**	**30,852,658,714**	**97,577,258,890**	**85.51**	**81.42**	**94.51**	**96.87**

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada tahap pascabencana.

Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan kebencanaan. Berpijak pada kondisi diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mampu menelurkan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan layanan bidang kebencanaan secara maksimal dan komprehensif, serta secara aktif melakukan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait yang bergerak dibidang kemanusiaan dan kebencanaan.

Sebagai Koordinator penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. TNI
2. POLRI
3. BMKG
4. BPPT
5. BKSDA
6. Manggala Agni
7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
12. BPBD Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah

13. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
14. Bandar Udara Tjilik Riwut
15. Badan SAR Regional Kalteng
16. Tagana Dinsos Provinsi Kalimantan Tengah
17. Perguruan Tinggi;
18. ORARI
19. Barisan Pemadam Kebakaran swasta
20. Dan Lain-lain.

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan bencana, antara lain :

a. Adanya bagi perlindungan rakyat dan resiko bencana.
b. Perubahan cara pandang dari responsive menjadi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan.
c. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
d. Penanggulangan bencana diatur, diselenggararakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah.
e. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada.
f. Mengatur hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggaran penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

a. Komponen legislasi mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/ kota.
b. Komponen kelembagaan terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/ kota.
c. Komponen perencanaan terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/ kota.

d. Komponen pendanaan, terkait dengan penanggaran dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana yang menimbulkan kerentanan baru.
e. Pengembangan kapasitas di semua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaran penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan urusan bersama semua sektor lini, dan tiap-tiap komponen dalam system penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sebagai Lembaga yang dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur.

Faktor-faktor tersebut merupakan infokator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Kapasitas sumber daya PB di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah jika dibandingkan dengan intensitas bencana dan luasnya wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang rawan bencana belumlah ideal.

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain :

a. Masih terbatasanya SDM yang paham dan mengerti tentang penangananan bencana.
b. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana.
d. Masih terbatasnya ketersiadaan Logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat terdampak bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
e. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana (Destana) di seluruh desa rawan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
f. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
g. Belum memadainya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
h. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
i. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis serta identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita selanjutnya dapat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, serta pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah.

Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Deerah

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
1. Minimnya sarana dan prasarana pencegahan dini bencana 2. Rendahnya kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rendahnya mitigasi dan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana	Kurangnya Masyarakat sadar bencana
1. Belum optimalnya bantuan logistik begi korban bencana 2. Belum optimalnya penangangan darurat bencana	Rendahnya penanganan korban bencana	Luas wilayah daerah yang terdampak bencana dan aksebilitas ke tempat penyaluran
1. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana 2. Belum optimalnya pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana	Rendahnya penanganan pasca bencana	Masyarakat masih belum mendapatkan penanganan yang konfrehensif dalam pasca bencana
1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang 2. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia 3. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Rendahnya kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kurangnya pemahaman dalam mempresentasikan kebencanaan

2.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dapat mempengaruhi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari *(isu global, nasional, dan regional).*

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Rendahnya Mitigasi dan pencegahan dini dalam penanggulangan Bencana	Mitigasi dan Perubahan Iklim	Cuaca ekstrim yang terjadi akibat perubahan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia rusaknya ekosistem musnahnya harta benda dan atau kerugian finansial akibat kejadian cuaca ekstrim	Transisi energi untuk pemerataan *(Just Energy Transition)* Transisi energi adalah peralihan System pemanfaatan energi dari yang tidak berkelanjutan menuju energi berkelanjutan	Perlunya Optimalisasi Penanganan Bencana yang turut mendukung mitigasi perubahan iklim	Belum optimalnya kesadaran bahwa bencana urusan bersama
	Rendahnya penanganan korban bencana		Meningkatnya populasi penduduk memberikan konsekuensi logis yakni peningkatan jumlah polutan dan limbah yang dihasilkan	Penuaan Penduduk *(Aging Population)* adalah fenomena dimana proporsi penduduk usia lanjut dan suatu populasi meningkat	Kurangnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kurangnya koordinasi antar instansi, dampak sosial dan ekonomi, isu local yang mempengaruhi kesiapan bencana	Perlunya percepatan penanganan kejadian bencana
	Rendahnya Penanganan Pasca bencana		Keterbatasan akses bantuan, kurangnya koordinasi antar lintas sector, perubahan iklim dan dampaknya	Wilayah-wilayah yang secara geografis rawan bencana atau tingkat sosialnya rendah sering kali membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan pasca bencana	Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pasca bencana	Belum optimaslnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Rendahnya kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		Perubahan Iklim, bencana alam yang meningkat dan glabalisasi	Koordinasi antar Lembaga, SDM terbatas, regulasi yang belum optimal, keterbatasan data dan informasi	Perbedaan kondisi geografis, Perbedaan sosial ekonomi, Kapasitas masyarakat	Masih kurangnya kapasitas/pemahaman terkait kebencanaan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Tujuan dan Sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam Misi 3 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 "**Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan".** Yang bertujuan **"Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat"** dengan Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dengan Target penurunan Skor Indeks Resiko Bencana dari 5 tahun berjalan yang menjadi Target Kepala Daerah. Dan memiliki sasaran **"Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana"** dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahan Daerah (IKD) dengan Target Meningkatkan 0,04 Point Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5 tahun berjalan yang menjadi target Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari tujuan dan sasaran yang sudah di tetapkan di RPJMD Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 1 Program Prioritas yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Kinerja yang bertujuan sebagai berikut :

- Persentase Penanganan Pra Bencana.
- Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana.
- Persentase pendampingan penanganan pasca bencana.
- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
- Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal.

Berikut merupakan tabel tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 serta hasil penjabaran tujuan strategis bidang urusan pemerintahan penanggulangan bencana :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran										
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.	Menurunkan resiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana		Indeks Risiko Bencana	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45	
			Indeks Ketahanan Daerah	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75	
		Meningkatkan Ketahanan Daerah melalui ketangguhan dan mitigasi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.49	0.53	0.55	0.57	0.60	0.62	
		Meningkatnya kinerja akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	68	70	73	76	79	82	

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi BPBD yang mencakup kebijaksanaan organisasi, program operasional organisasi dan kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi yaitu *(Disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, Misi: Meningkatkan Ketahanan Ekologi dan Ketangguhan Daerah terhadap Bencana)* :

Strategi 1 – Peningkatan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana

- Melaksanakan pemetaan risiko dan pembuatan peta rawan bencana di seluruh kabupaten/kota;
- Mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan RTRW dan RPJPD/RPJMD daerah;
- Membangun infrastruktur mitigasi: sekat kanal, tanggul, embung, dan menara pantau karhutla;
- Menerapkan teknologi peringatan dini (Early Warning System) di kawasan rawan banjir, karhutla, dan longsor;dan
- Mendorong solusi berbasis alam untuk pengendalian bencana (normalisasi sungai, rehabilitasi gambut, penghentian pembakaran lahan).

Strategi 2 – Penguatan Sistem Kesiapsiagaan dan Kapasitas Daerah

- Pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di provinsi dan kabupaten/kota.
- Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) beroperasi 24 jam.
- Pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) minimal 100 desa pada 2029.
- Pelaksanaan simulasi bencana dan pelatihan lintas instansi (BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Dinsos).
- Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, sertifikasi ICS, dan pelatihan emergency management.

Strategi 3 – Penguatan Respons Cepat dan Penanganan Darurat

- Penyediaan logistik dan peralatan tanggap darurat (alat evakuasi, komunikasi, perahu, tenda, obat, logistik).
- Penempatan gudang logistik regional di zona barat, tengah, dan timur Kalteng.
- Pengoperasian aplikasi digital E-Bencana Kalteng untuk pelaporan dan penyaluran bantuan cepat.
- Penetapan prosedur komando penanganan darurat terpadu (Incident Command System / ICS) di seluruh daerah.
- Pelaksanaan respons cepat ≤6 jam sejak kejadian bencana dilaporkan.

Strategi 4 – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) daerah.
- Rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih).
- Bantuan stimulan rumah rusak bagi korban bencana.
- Program pemulihan ekonomi masyarakat terdampak (UMKM, pertanian, nelayan).
- Rehabilitasi lingkungan terdampak bencana, khususnya kawasan gambut dan DAS.

Strategi 5 – Penguatan Literasi, Edukasi, dan Partisipasi Masyarakat

- Sosialisasi kebencanaan melalui media, sekolah, dan lembaga masyarakat.
- Integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah dasar–menengah.
- Pembentukan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di tingkat kabupaten/kota.
- Kampanye publik “Keluarga Tangguh Bencana” dan Gerakan Aman Karhutla.
- Kolaborasi dengan tokoh adat dan tokoh agama dalam penyadaran risiko bencana.

Strategi 6 – Optimalisasi Pendanaan, Teknologi, dan Kolaborasi Multipihak

- Menyusun skema pembiayaan multi-sumber: APBD, APBN, CSR, dana desa, dan hibah donor.
- Mengembangkan Sistem Informasi Bencana Daerah (SIBADANA Kalteng) berbasis digital.
- Pemanfaatan drone, sensor cuaca, dan satelit hotspot untuk pemantauan karhutla.
- Membangun kemitraan dengan universitas, NGO, dan sektor swasta untuk riset dan inovasi kebencanaan.
- Penguatan tata kelola berbasis data spasial risiko bencana yang terintegrasi dengan RPJMD dan KLHS.

Berdasarkan dokumen Ranhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (2025–2030), khususnya bagian *Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat* (yang membawahi Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD), berikut tabel penahapan renstra:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi kelembagaan BPBD dan penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)	Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat	Digitalisasi sistem informasi kebencanaan dan logistik terpadu	Integrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam	Kemandirian daerah tangguh bencana dan replikasi inovasi

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, terpadu, dan sesuai dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah, perumusan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah strategis yang sangat penting.

Arah kebijakan ini disusun berdasarkan tugas dan adan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, perumusan ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga dirancang agar selaras dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga memiliki daya dorong yang kuat dalam meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan arah kebijakan yang dirumuskan mampu menjadi panduan yang operasional dan efektif dalam mengarahkan pelaksanaan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Tabel Berikut ini adalah rumusan arah kebijakan Rentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RPJMD :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisais NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Penguatan mitigasi bencana berbasis risiko dan adaptasi iklim	Peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap risiko bencana	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Penguatan sistem komando darurat dan koordinasi lintas sektor	Penguatan mitigasi bencana berbasis tata ruang dan adaptasi perubahan iklim	
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan profesionalisme dan sertifikasi petugas bencana	Pengembangan sistem peringatan dini dan manajemen darurat bencana terpadu	
4	Penyusunan Rencana Penanggulan Bencana	Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan edukasi publik	Penguatan kapasitas kelembagaan BPBD dan SDM tanggap bencana	
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Peningkatan literasi publik dan integrasi kurikulum sekolah	Pengembangan edukasi, literasi, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	
6	Pengelolaan Risiko Bencana	Optimalisasi logistik dan digitalisasi sistem pelaporan	Penguatan kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pendanaan dan penanganan bencana	
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama	Pemulihan sarana publik dan sosial-ekonomi		
8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Penguatan tata kelola berbasis data dan teknologi		
9	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi			
10	Penyedian Peralatan Perlindungan			
11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			
12	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
13	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Pendekatan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2026-2029 dikaitkan Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi,tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Kalimantan Tengah.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan upaya-upaya mitigasi bencana, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Penjabaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanggulangan Bencana telah sesuai dengan kerangka Permendagri No. 90/2019 (tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) serta lampiran perubahannya yang dipakai untuk dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Tahun 2025-2029 yang akan di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.	Menurunkan resiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
				Tersedianya Informasi dan Edukasi Menghadapi Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.01.0003 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02.0022 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	

					Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi	
					Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana	
					Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
					Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
				Persentase Pemenuhan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	1.05.03.1.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0025 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1.05.03.1.03.0027 - Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.1.03.0029 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi (Lembaga)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.1.04.0006 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi	

					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.1.04.0008 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.1.04.0009 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.1.04.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan	1.05.03.1.04.0011 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	

					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi (Lembaga)	1.05.03.1.04.0012 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	
					Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.1.04.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
					Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	1.05.03.1.04.0014 - Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	
					Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.1.04.0016 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1.05.03.1.04.0018 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.1.04.0021 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	
					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	

					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	
		Meningkatnya kinerja akuntabilitas perangkat daerah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)		
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1.05.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1.05.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1.05.01.1.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1.05.01.1.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	1.05.01.1.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				38.806.773.068,74		39.328.489.310,69		40.931.315.127,69		42.732.038.799,67		44.821.885.825,51		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.681.773.068,74		19.500.000.000,00		21.250.000.000,00		22.500.000.000,00		24.250.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (Angka)	65	70	16.681.773.068,74	73	19.500.000.000,00	76	21.250.000.000,00	79	22.500.000.000,00	82	24.250.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				890.000.000,00		925.000.000,00		1.270.000.000,00		1.045.000.000,00		1.455.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	3	890.000.000,00	3	925.000.000,00	3	1.270.000.000,00	3	1.045.000.000,00	3	1.455.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	14		14		14		0		14			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	200.000.000,00	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00	4	450.000.000,00	4	500.000.000,00		

1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00		
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	200.000.000,00	3	250.000.000,00	3	275.000.000,00	3	300.000.000,00	3	325.000.000,00		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	0	0,00	14	50.000.000,00		
1.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				75.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	3	75.000.000,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00		
1.05.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				75.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.951.773.068,74		10.690.000.000,00		10.995.000.000,00		11.295.000.000,00		11.610.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	10.951.773.068,74	0	10.690.000.000,00	0	10.995.000.000,00	0	11.295.000.000,00	0	11.610.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		0		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	42	82		82		82		82		82			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.066.773.068,74		9.750.000.000,00		10.000.000.000,00		10.250.000.000,00		10.500.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	42	82	10.066.773.068,74	82	9.750.000.000,00	82	10.000.000.000,00	82	10.250.000.000,00	82	10.500.000.000,00		

1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	800.000.000,00	1	850.000.000,00	1	900.000.000,00	1	950.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	30.000.000,00	1	35.000.000,00		

1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				230.000.000,00		340.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		560.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	230.000.000,00	0	340.000.000,00	0	450.000.000,00	0	450.000.000,00	0	560.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		0		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.05.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD				200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	0	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.05.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		255.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	180.000.000,00	0	215.000.000,00	0	230.000.000,00	0	245.000.000,00	0	255.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		0			

	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	65	65		65		65		65		65			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
1.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	60.000.000,00	10	65.000.000,00	0	75.000.000,00		
1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	65	65	100.000.000,00	65	130.000.000,00	65	140.000.000,00	65	150.000.000,00	65	150.000.000,00		
1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				840.000.000,00		855.000.000,00		1.030.000.000,00		1.010.000.000,00		1.205.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	840.000.000,00	0	855.000.000,00	0	1.030.000.000,00	0	1.010.000.000,00	0	1.205.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		0			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		325.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00	12	325.000.000,00	12	400.000.000,00		

1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00		
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	0	40.000.000,00		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	600.000.000,00		
1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				700.000.000,00		1.300.000.000,00		1.575.000.000,00		1.850.000.000,00		2.150.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	700.000.000,00	0	1.300.000.000,00	0	1.575.000.000,00	0	1.850.000.000,00	0	2.150.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				200.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00	0	400.000.000,00		
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.750.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	500.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.250.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	1.750.000.000,00		
1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah				1.090.000.000,00		1.820.000.000,00		2.125.000.000,00		2.380.000.000,00		2.685.000.000,00		

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1.090.000.000,00	0	1.820.000.000,00	0	2.125.000.000,00	0	2.380.000.000,00	0	2.685.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		0		1		1			
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000.000,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				475.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.750.000.000,00		2.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	475.000.000,00	1	1.250.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.800.000.000,00		3.355.000.000,00		3.575.000.000,00		4.225.000.000,00		4.330.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1.800.000.000,00	0	3.355.000.000,00	0	3.575.000.000,00	0	4.225.000.000,00	0	4.330.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	37		37		37		37		37		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0		
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	37	1.000.000.000,00	37	800.000.000,00	37	850.000.000,00	37	900.000.000,00	37	950.000.000,00	
1.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	100.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	150.000.000,00	12	175.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000,00		2.430.000.000,00		2.600.000.000,00		3.175.000.000,00		3.205.000.000,00	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	700.000.000,00	3	2.430.000.000,00	3	2.600.000.000,00	3	3.175.000.000,00	3	3.205.000.000,00		
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				22.125.000.000,00		19.828.489.310,69		19.681.315.127,69		20.232.038.799,67		20.571.885.825,51		
Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	22.125.000.000,00	100	19.828.489.310,69	100	19.681.315.127,69	100	20.232.038.799,67	100	20.571.885.825,51	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	50	60		65		70		75		80			
1.05.03.1.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				225.000.000,00		200.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		275.000.000,00		

Tersedianya Informasi dan Edukasi Menghadapi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	225.000.000,00	200	200.000.000,00	200	450.000.000,00	200	450.000.000,00	200	275.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	0	1		0		1		1		0			
1.05.03.1.01.0003 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi				50.000.000,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
1.05.03.1.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)				175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	175.000.000,00	200	200.000.000,00	200	250.000.000,00	200	250.000.000,00	200	275.000.000,00		
1.05.03.1.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.150.000.000,00		2.450.000.000,00		2.600.000.000,00		3.075.000.000,00		3.550.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		14	2.150.000.000,00	14	2.450.000.000,00	14	2.600.000.000,00	14	3.075.000.000,00	14	3.550.000.000,00		
	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	10	10		10		10		10		10			

	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50		
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1	1						1				
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)		1								1		
	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	500	500		500		500		500		500		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1	1								1		
	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1		
	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

1.05.03.1.02.0013 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00		
1.05.03.1.02.0022 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)		1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00		
1.05.03.1.02.0023 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		
1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi				200.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00		0,00		
1.05.03.1.02.0025 - Penyusunan Rencana Kontijensi				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1	1	250.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1	300.000.000,00		
1.05.03.1.02.0026 - Pengelolaan Risiko Bencana				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		

Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.05.03.1.02.0027 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	10	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	250.000.000,00	
1.05.03.1.02.0028 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				500.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	500	500	500.000.000,00	500	1.250.000.000,00	500	1.300.000.000,00	500	1.500.000.000,00	500	1.500.000.000,00	
1.05.03.1.02.0029 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	
Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.05.03.1.02.0030 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	50	50	250.000.000,00	50	275.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	350.000.000,00	
1.05.03.1.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				16.950.000.000,00		13.993.489.310,69		13.536.315.127,69		13.402.038.799,67		13.006.885.825,51	

Persentase Pemenuhan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	16.950.000.000,00	1	13.993.489.310,69	0	13.536.315.127,69	1	13.402.038.799,67	1	13.006.885.825,51		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1	1		1		1		0		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	50		50		50		50		50			
1.05.03.1.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		
1.05.03.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		

Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal (Dokumen)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.03.1.03.0025 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	1	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	0	150.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.03.1.03.0026 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00		
1.05.03.1.03.0027 - Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit				75.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.05.03.1.03.0028 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500	5.000	1.000.000.000,00	5.000	2.000.000.000,00	5.000	2.000.000.000,00	5.000	2.000.000.000,00	5.000	2.000.000.000,00		
1.05.03.1.03.0029 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.03.1.03.0030 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	0	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.05.03.1.03.0031 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				15.000.000.000,00		10.868.489.310,69		10.361.315.127,69		10.152.038.799,67		9.581.885.825,51		

Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	0	1	15.000.000.000,00	1	10.868.489.310,69	1	10.361.315.127,69	1	10.152.038.799,67	1	9.581.885.825,51		
1.05.03.1.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				2.800.000.000,00		3.185.000.000,00		3.095.000.000,00		3.305.000.000,00		3.740.000.000,00		
Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1	1	2.800.000.000,00	1	3.185.000.000,00	1	3.095.000.000,00	0	3.305.000.000,00	1	3.740.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		50		50		50		50		50			
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)		1		1		1		1		1			

	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi (Lembaga)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1		1		0		0		1		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	50		50		50		50		50			
1.05.03.1.04.0006 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		50	50.000.000,00	50	60.000.000,00	50	70.000.000,00	50	80.000.000,00	50	90.000.000,00		
1.05.03.1.04.0007 - Penanganan Pasca Bencana Provinsi				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00		
1.05.03.1.04.0008 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.05.03.1.04.0009 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		

Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.05.03.1.04.0010 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.03.1.04.0011 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.05.03.1.04.0012 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi (Lembaga)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0014 - Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.05.03.1.04.0016 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0018 - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	0	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
1.05.03.1.04.0021 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	

Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00		
1.05.03.1.04.0022 - Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.05.03.1.04.0023 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun (kabupaten/kota)	14	14	100.000.000,00	14	125.000.000,00	14	150.000.000,00	14	200.000.000,00	14	250.000.000,00		
1.05.03.1.04.0024 - Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor				100.000.000,00		150.000.000,00		0,00		0,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00		

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukiung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program/ Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Penanggulangan Bencana**	**Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Pengelolaan Risiko Bencana	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penanganan Pasca Bencana Provinsi	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	

			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	
			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
			Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	
			Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	
			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	

4.2 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan untuk penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat di lihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95	94,85	93,97	93,09	92,21	91,33	90,45	
3.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,49	0,53	0,55	0,57	0,6	0,62	
4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	65	68	70	73	76	79	82	
5.	Meningkatnya Indek Ketahanan daerah	Angka	0,45	0,49	0,53	0,55	0,57	0,6	0,62	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		Persentase	4	5	6	7	9	11	13	
3.	Persentase pelaksanaan pendampingan dan pemulihan pascabencana dengan terencana, cepat, dan terkaji sesuai kebutuhan dan ketersedian dokumen resiko bencana		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada analisis terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, percepatan penanganan darurat, pemulihan pascabencana, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Secara substansial, Renstra ini menekankan pada:

1. Integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah melalui mainstreaming kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai sektor.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan BPBD agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana secara efektif.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
4. Penerapan sistem informasi dan teknologi kebencanaan untuk mendukung peringatan dini, komunikasi risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data.
5. Peningkatan efektivitas pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD, APBN, maupun dukungan non-pemerintah.

Dengan demikian, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman penting bagi penyelenggaraan pembangunan daerah yang berketahanan bencana serta mampu melindungi masyarakat, lingkungan, dan aset pembangunan dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas kinerja, serta keterpaduan lintas sektor dan wilayah. Beberapa kaidah pokok pelaksanaan meliputi:

1. Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional, seperti RPJMD, RPJMN, serta rencana kontinjensi dan rencana aksi daerah.
2. Keterpaduan lintas pemangku kepentingan, melibatkan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga usaha, organisasi masyarakat, media, akademisi, dan relawan.
3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak langsung pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat.
4. Keadilan dan keberlanjutan, memastikan penanganan bencana memperhatikan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, difabel) serta menjamin keberlanjutan lingkungan.
5. Adaptif dan responsif terhadap dinamika bencana, termasuk perubahan iklim, kondisi geografis, sosial, dan teknologi.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai arah kebijakan dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Pengendalian
   - Dilakukan secara periodik melalui monitoring capaian program, kegiatan, dan indikator kinerja utama (IKU) BPBD.

- Menggunakan instrumen laporan kinerja, rapat koordinasi, supervisi, serta pemantauan lapangan.
- Penyesuaian strategi dan kebijakan dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi darurat bencana atau dinamika pembangunan.

2. Evaluasi
   - Dilaksanakan secara tahunan melalui evaluasi Renstra, yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
   - Evaluasi jangka menengah dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program.
   - Hasil evaluasi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan strategi, serta penyusunan rencana pembangunan daerah berikutnya.

Dengan adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, implementasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat berlangsung secara konsisten, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana dapat tercapai.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MISI 3
Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas

Tujuan RPJMD 6
Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

1	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sasaran RPJMD 18
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana

1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2	Nilai SAKIP

KEPALA DAERAH

Kinerja Strategis Daerah

TUJUAN DI RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tujuan Renstra 1
Menurunkan resiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kinerja Urusan/ Sub Urusan

SASARAN DAN INDIKATOR DI RENSTRA
ESELON II

Sasaran Renstra 1
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana

1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2	Nilai SAKIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sasaran Perjanjian Kinerja
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.

1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2	Nilai SAKIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kepala Pelaksana BPBD

Kinerja Taktikal

DI SASARAN PROGRAM KEGIATAN RENSTRA UNTUK ESELON III

DI DPA UNTUK ESELON IV DAN JAFUNG

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya Urusan Pemerintah DaerahTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	Tersedianya dukungan administrasi perkantoran yang tertib dan tepat waktu
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat
3	Tersedianya dukungan pengelolaan keuangan yang akuntabel
4	Terselenggaranya dukungan administrasi perencanaan dan pelaporan

Sekretaris Badan

Sasaran Kinerja Pegawai
Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat

1	Jumlah administrasi kepegawaian yang diproses sesuai standar waktu

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kinerja Pegawai
Terselenggaranya dukungan administrasi perencanaan dan pelaporan

1	Jumlah dokumen perencanaan & laporan kinerja tepat waktu

Kasubag Penyusunan Program

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya dukungan pengelolaan keuangan yang akuntabel

1	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu

Kasubag Keuangan dan Aset

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya Penanganan Pra Bencana

1	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2	Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota
3	Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

1	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota

1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan

1	Jumlah Laporan Hasil Tersusunnya Regulasi

Jabatan Fungsional

UNIT KERJA

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya penanganan tanggap bencana darurat

1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaTerlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritasa
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran Kinerja Pegawai
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaTerlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

1	Persentase Pemenuhan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritasa

1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Jabatan Fungsional

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Persentase Penanganan Pasca Bencana

1	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
2	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBDdan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi
3	Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

1	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota

1	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang diiegkan

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)

1	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

Jabatan Fungsional

Kinerja Operasional

Sasaran RPJMD 18							
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana							
	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD	0,49	0,53	0,55	0,57	0,6	0,62
2	Nilai SAKIP	68,00	70	73	76	79	82

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran Renstra 1								
Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana								
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,49	0,53	0,55	0,57	0,6	0,62
2	Nilai SAKIP	Nilai	68,00	70	73	76	79	82
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)								

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	55	60	65	70	75	80
5	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025		Rp39.257.000.000						
Anggaran Tahun 2026		Rp22.125.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp19.828.489.311						
Anggaran Tahun 2028		Rp19.681.351.128						
Anggaran Tahun 2029		Rp20.232.038.799						
Anggaran Tahun 2030		Rp20.571.885.825						

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penanganan pra bencana	Nilai	100	100	100	100%	100%	100%
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp16.681.773.068						
Anggaran Tahun 2027		Rp19.500.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp21.250.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp22.500.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp24.250.000.000						

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp1.500.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp2.450.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp2.600.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp2.825.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp3.000.000.000						

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp400.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp635.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp470.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp530.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp590.000.000						

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp16.850.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp13.893.489.310						
Anggaran Tahun 2028		Rp13.436.315.127						
Anggaran Tahun 2029		Rp13.302.038.799						
Anggaran Tahun 2030		Rp12.856.885.825						

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	55	60	65	70	75	80
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp175.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp200.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp250.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp250.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp275.000.000						

KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp890.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp925.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp1.270.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp1.045.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp1.455.000.000						

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp650.000.000						
Anggaran Tahun 2027		-						
Anggaran Tahun 2028		-						
Anggaran Tahun 2029		Rp250.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp550.000.000						

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp100.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp100.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp100.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp100.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp150.000.000						

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp450.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp525.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp400.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp450.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp650.000.000						

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp50.000.000						
Anggaran Tahun 2027		-						
Anggaran Tahun 2028		Rp200.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp200.000.000						
Anggaran Tahun 2030								

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp10.951.773.068						
Anggaran Tahun 2027		Rp10.690.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp10.995.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp11.295.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp11.610.000.000						

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp230.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp340.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp450.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp450.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp560.000.000						

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp180.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp215.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp230.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp245.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp255.000.000						

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp840.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp855.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp1.030.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp1.010.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp1.205.000.000						

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp700.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp1.300.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp1.575.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp1.850.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp2.150.000.000						

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp1.090.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp18.200.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp2.125.000.000						
Anggaran Tahun 2029		Rp2.380.000.000						
Anggaran Tahun 2030		Rp2.685.000.000						

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	68	70	73	76	79	82
Anggaran Tahun 2025								
Anggaran Tahun 2026		Rp1.800.000.000						
Anggaran Tahun 2027		Rp3.355.000.000						
Anggaran Tahun 2028		Rp3.575.000.000						

SUB KEGIATAN

Anggaran Tahun 2029	Rp4.225.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp4.330.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT
Jalan Yos Sudarso No. 06, Telp/Fax. (0536) 3222359
e-mail : inspektorat@kalteng.go.id website : www.inspektorat.kalteng.go.id
PALANGKA RAYA

LAPORAN HASIL REVIU
(L H R)

TERHADAP
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 20205-2029

NOMOR : 700.1.2.1/172/LHR/2025/INSP
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

NOMOR : 700.1.2.1/172/LHR/2025/INSP

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, yang mencakup pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

   Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

   Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029, telah selaras.
   b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, telah selaras.
   c. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.
   d. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.
   e. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

Diperiksa oleh :	PKU	DALNIS	KT	AT
Paraf				

f. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

g. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

Berdasarkan hasil reviu, terdapat catatan sebagai berikut:

Data pada Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/diinput pada SIPD / e-reviu, sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada Renstra 2025 s.d 2029.

II. DASAR REVIU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
5. Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi dan RPJMD Provinsi untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi; dan
5. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, dan RPJMD kabupaten/kota untuk Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Diperiksa oleh :	PPD	DALNIS	KT	AT
Paraf				

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029:
   a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
   b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:
   a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
   b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. METODOLOGI REVIU

Metodologi yang digunakan dalam reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. IKU, IKD dan Laporan Evaluasi Renstra 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Dokumen Perencanaan lainnya.
2. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tanya jawab dan permintaan keterangan.
3. Pengujian terbatas terhadap data yang tersedia pada SIPD-E Reviu.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan reviu Rencana Strategis 2025-2029.

VI. SUSUNAN TIM REVIU

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	EKO SULISTIONO, SSTP, M.AP, CGCAE NIP. 19791107 199810 1 001
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	TEGUH DAYANTO, SE., CGCAE NIP. 19740919 200604 1 009
3.	Pengendali Teknis	:	WAHYUDININGRAT, S.STP NIP. 19800507 199810 1 001
4.	Ketua Tim	:	DANIEL TUPAK, S.H., CFrA NIP. 19860601 201001 1 007

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

5. Anggota Tim : a) SURYANA FS WENI, S.IP
NIP. 19871007 201101 2 002
b) RENDY KURNIANTO, S.E.,CGRM
NIP. 19870925 201402 1 004
c) CHRISTIAN H. SIHOMBING, S.T
NIP. 19901218 202504 1 002

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 10 September 2025.

VII. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sosial.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; c. penyusunan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;

Diperiksa oleh :	PPD	DALNIS	KT	AT
Paraf				

d. penyusunan prosedur operasional tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;

e. penyelenggara penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;

f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;

g. perumusan kebijakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

i. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:

1) Sekretariat, terdiri atas:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:

a) Sub Bidang Pencegahan; dan

b) Sub Bidang Kesiapsiagaan.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:

a) Sub Bidang Kedarutan; dan

b) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:

a) Sub Bidang Rehabilitasi; dan

b) Sub Bidang Rekonstruksi.

5) Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi, terdiri atas:

a) Sub Bidang Pemetaan dan Pencegahan;

b) Sub Bidang Fasiltasi, Penyelamatan dan Bantuan Teknis; dan

c) Sub Bidang Fasilitasi, Penyelamatan dan Bantuan Bencana.

6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Diperiksa oleh :	PRJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

   Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam RENSTRA PD Tahun 2025 -2029, telah selaras. rincian terlampir pada Kertas Kerja Reviu 1 (KKR 1).

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	KETERANGAN
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKU	TUJUAN	Selaras
3	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	IKD	PROGRAM	Selaras
4	Persentase penanganan pra bencana	%	IKD	PROGRAM	Selaras
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	IKU	SASARAN	Selaras
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras
7	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	IKD	PROGRAM	Selaras
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKD	TUJUAN	Selaras
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKD	TUJUAN	Selaras
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKU	SASARAN	Selaras

Diperiksa oleh :	PPD	DALNIS	KT	AT
Paraf				

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, telah selaras.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

   a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	KET
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	
2	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.

   b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	Keterangan
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	-	-	
3	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras
4	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Non Prioritas)	-	-	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

   a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	65	82	82	100%	65	68	70	73	76	79	82
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.44	0.49	0.53	0.55	0.57	0.60	0.62

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

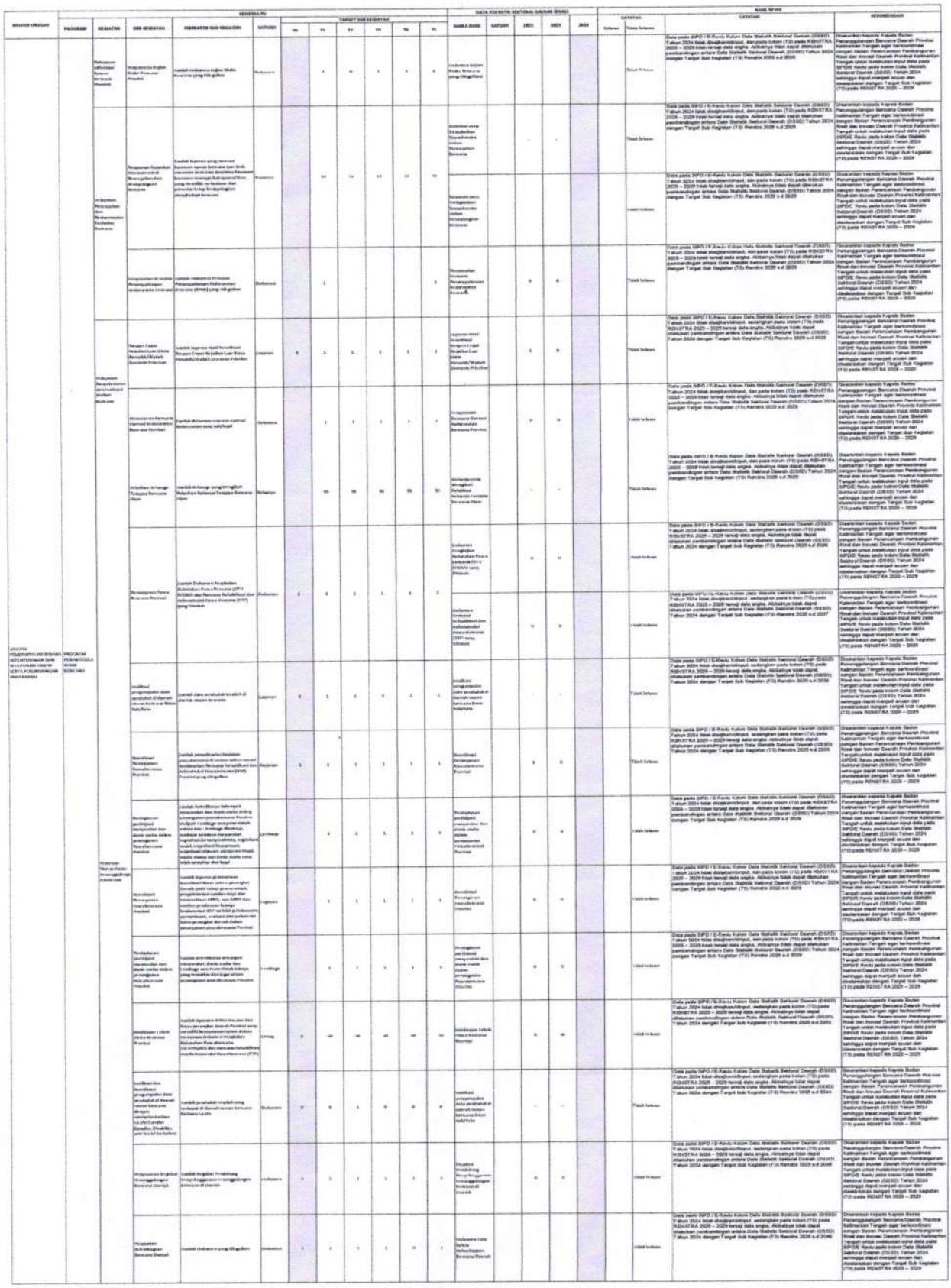
NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan pra bencana	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
4	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0.55	0.8	0.8	100%	50	55	60	65	70	75	80
5	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
6	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45
7	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.4	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Rincian perbandingan target subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah, mengacu pada tabel Kertas Kerja 7 (KKR 7), Sebagai berikut :

Diperiksa oleh :	PPD	DALNIS	KT	AT
Paraf				



Berdasarkan Kertas Kerja 7 (KKR 7) terdapat hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada Renstra tahun 2025 – 2029 ada tersaji data angka maupun tidak tersaji data. Akibatnya tidak dapat

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra tahun 2025 s.d 2029.

Seharusnya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 menjadi acuan Target Sub Kegiatan (T0) pada Renstra tahun 2025 – 2029

IX.SARAN

Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPD/E Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada Renstra tahun 2025 – 2029.

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

X. APRESIASI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

MENGETAHUI,

Pembantu Penanggung Jawab,
Inspektur Pembantu III,

TEGUH DAYANTO, SE., CGCAE
Pembina
NIP. 19740919 200604 1 009

TIM REVIU,

1. **WAHYUDININGRAT, S.STP**
   NIP. 19800507 199810 1 001
   (Pengendali Teknis) .....
2. **DANIEL TUPAK, S.H., CFrA**
   NIP. 19860601 201001 1 007
   (Ketua Tim) .....
3. **SURYANA FS WENI, S.IP**
   NIP. 19871007 201101 2 002
   (Anggota Tim) .....
4. **RENDY KURNIANTO, S.E.,CGRM**
   NIP. 19870925 201402 1 004
   (Anggota Tim) .....
5. **CHRISTIAN H. SIHOMBING, S.T**
   NIP. 19901218 202504 1 002
   (Anggota Tim) .....

MENYETUJUI,
Plt. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh / Tanggal	:	Christian H. Sihombing, S.T
	Direviu Oleh / Tanggal	:	Daniel Tupak,SH.CFrA
	Disetujui Oleh / Tanggal	:	Wahyudiningrat,S.STP

REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

Uraian Hasil Reviu:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

   Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam RENSTRA PD Tahun 2025 -2029, telah selaras.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	KETERANGAN
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKU	TUJUAN	Selaras
3	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	IKD	PROGRAM	Selaras
4	Persentase penanganan pra bencana	%	IKD	PROGRAM	Selaras
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	IKU	SASARAN	Selaras
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras
7	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	IKD	PROGRAM	Selaras
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKD	TUJUAN	Selaras
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKD	TUJUAN	Selaras
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKU	SASARAN	Selaras

Mengacu pada tabel tersebut diatas, maka Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, telah selaras

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	KET
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	Program ini bukan merupakan kewenangan dari BPBD
2	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras

Mengacu pada tabel tersebut diatas, maka Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.

b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	Keterangan
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	-	-	Program ini bukan merupakan kewenangan dari BPBD
3	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras
4	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Non Prioritas)	-	-	Program ini bukan merupakan kewenangan dari BPBD (melainkan Satpol PP)

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, telah selaras.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	65	82	82	100%	65	68	70	73	76	79	82
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan	Indeks Ketahanan	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.44	0.49	0.53	0.55	0.57	0.60	0.62

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
	Bencana dan Pemadam Kebakaran	Daerah												

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					
									T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan pra bencana	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
4	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0.55	0.8	0.8	100%	50	55	60	65	70	75	80
5	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100
6	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45
7	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.4	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, telah selaras.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

RUANG LINGKUP	RENSTRA PD												DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN							NAMA DSSD	SATUAN	2023	2025	2026	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
						Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5								Sesuai	Tidak Sesuai		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBNON PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditetapkan	Dokumen		1	0	1	1	0	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditetapkan		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengadaan Sarana/Prasarana Kesiapsiagaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah layanan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan rawan bencana strategis Kabupaten/Kota yang memiliki risikotinggi dan prioritas untuk ditetapkan menjadikawasan strategis kabupaten/kota	Kawasan		14	14	14	14	14	Kawasan yang Ditetapkan Kawasanrawan bencana Daerah Provinsi		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
													Kawasan yang Ditetapkan Kawasanrawan bencana Kabupaten/Kota		-	-			Tidak Sesuai			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Kerangka Penanggulangan Bidai uraian Bencana (RPBB) yang Ditetapkan	Dokumen		1				1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengadaan Sarana/Prasarana Operasi Gabungan Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana	Jumlah layanan Hasil Identifikasi Bidang Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Layanan	1	1	1	1	1	1	Layanan Hasil Identifikasi Bidang Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		1	1			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Penyusunan Rencana Operasi Gabungan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang ditetapkan	Dokumen		1	1	1	1	1	Penyusunan Rencana Operasi Gabungan Bencana Provinsi		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
		Penelitian Dalam Bidang Penanggulangan Bencana	Penelitian Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang Mengikuti Penelitian Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		50	50	50	50	50	Keluarga yang Mengikuti Penelitian Keluarga Tanggap Bencana Alam		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (DTU PASKA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RDP) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (DTU PASKA) yang Disusun		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
													Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RDP) yang Disusun		0	0			Tidak Sesuai			
			Hasil/Skor pengumuman data pembakuan di daerah rawan bencana Indeks Ketahanan	Jumlah data pembakuan terdidik di daerah rawan bencana	Laporan	0	1	1	1	1	1	Hasil/Skor pengumuman data pembakuan di daerah rawan bencana (Indeks Ketahanan		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Koordinasi Penanganan Kesiapsiagaan Provinsi	Jumlah pemeliharaan kegiatan sosialisasi/bimtek untuk sektor sosial tentang kesiapsiagaan bencana (kerjasama dengan Kesbangpol, Dinsos, dan Kesehatan)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi Penanganan Kesiapsiagaan Provinsi		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah sekolah/Satuan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga Filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan lain	Lembaga		1	1	1	1	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Provinsi		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Koordinasi Penanganan Kesiapsiagaan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor penanganan darurat pada tahap pemberangkatan, penggerahkan jumlah tipe dan kelayakan PRRD, dan RPBD dan kondisi pelaksanaan lintas penanganan darurat dalam penanganan kesiapsiagaan Provinsi	Laporan		1	1	1	1	1	Koordinasi Penanganan Kesiapsiagaan Provinsi		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah lembaga/Satuan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana yang terdaftar dan ikut dalam penanganan pasca bencana Provinsi	Lembaga		1	1	1	1	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Provinsi		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 tidak terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Simulasi/gladi lapangan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan Unsur pendukung daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (DTU/PASKA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RDP)	Orang	0	30	30	30	30	30	Simulasi/gladi lapangan Pasca Bencana Provinsi		0	30			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Hasil/Skor dan koordinasi pengumpulan data pembakuan di daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan IDDSI (Gender Disaster, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah pembakuan terdidik yang terdapat di daerah rawan bencana terkait IDDSI	Dokumen	0	0	1	0	0	0	Hasil/Skor pengumpulan data pembakuan di daerah rawan bencana (Indeks Ketahanan		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penanggulangan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokument	1	1	1	1	1	1	Regulasi Pendukung Penanggulangan Penanggulangan Bencana di Daerah		0	0			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029
			Pengadaan Kendaraan Bencana Daerah	Jumlah dokumen yang di Kegiatkan	Dokumen	1	1	1	1	0	1	Dokumen Tata Kelola Penanggulangan bencana daerah		-	-			Tidak Sesuai	Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak ditemukan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029 terisi data angka. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2026 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPGDE Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan disekerasikan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2026 – 2029

Rincian perbandingan target subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah, mengacu pada tabel tersebut diatas dan Kertas Kerja 7 (KKR), terlampir.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dan Kertas Kerja 7 (KKR), terdapat catatan sebagai berikut:

Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/diinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 ada data yang tersaji dan tidak tersaji data. Akibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029.

Seharusnya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 menjadi acuan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029

Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPD/E Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029.

Palangka Raya, September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah,

AHMAD TOYIB,S.STP.M.Si
NIP. 19790319 199711 1 001

Inspektur Pembantu III,

TEGUH DAYANTO, SE., CGCAE
NIP. 19740919 200604 1 009

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHDAN/ATAU PERTUMBUHAN KINERJA URUSAN DAERAHYANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PDProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (KKR 1)

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Menurunkan resiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kinerja akuntabilitas perangkat daerah	- Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2						1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3						1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4						1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5						1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6						1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7						1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8						1.05.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
9						1.05.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10						1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
11						1.05.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
12						1.05.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
13						1.05.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14					1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
15						1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
16						1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
17						1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
18						1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
19						1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
20						1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
21						1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
22					1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
23						1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
24						1.05.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
25						1.05.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
26						1.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
27						1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
28						1.05.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
29					1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
30						1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31						1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
32						1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
33						1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
34						1.05.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
35						1.05.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
36						1.05.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
37						1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
38						1.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
39						1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
40					1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
41						1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
42						1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
43						1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
44						1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
45						1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
46						1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
47						1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
48						1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
49						1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
50						1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
51					1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
52						1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
53						1.05.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
54						1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
55						1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
56						1.05.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
57						1.05.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
58						1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
59						1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
60						1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
61					1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
62						1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
63						1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
64						1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
65					1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
66						1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
67						1.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
68						1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
69						1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
70						1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
71						1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KETERHUBUNGAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PDProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (KKR 2)

BIDANG URUSAN YANG DIAMPU: PENANGGULANGAN BENCANA

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	Persentase penanganan pra bencana	%	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	IKD	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKD	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Dengan Program Prioritas Daerah Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (KKR 3)

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA 1.05.0.00.0.00.03.0000 - dengan program Prioritas Daerah Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (KKR 4)
URUSAN YANG DIAMPU: Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	-	-	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Non Prioritas)	-	-	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRADENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYAProvinsi Kalimantan Tengah PERIODE 2025 – 2029

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (KKR 5)

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	65	82	82	100%	65	68	70	73	76	79	82	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.44	0.49	0.53	0.55	0.57	0.60	0.62	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYA Provinsi Kalimantan Tengah PERIODE 2025 – 2029

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (KKR 6)

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan pra bencana	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0.55	0.8	0.8	100%	50	55	60	65	70	75	80	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	1	1	1	100%	100	100	100	100	100	100	100	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.85	90.45	90.45	100%	95	94.85	93.97	93.09	92.21	91.33	90.45	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	0.62	0.62	100%	0.4	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KESESUAIAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAHDALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025 s.d 2029 - Provinsi Kalimantan Tengah TAHUN 2025

Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KKR 7.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD						TARGET SUB KEGIATAN					DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			AT	KT	DL
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	T0	T1	T2	T3	T4	T5	NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		REKOMENDASI			
																		Selaras	Tidak Selaras				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen		1	0	1	1	0	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	-	-	-		Tidak Selaras		Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
2			Pelayanan Penegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan		14	14	14	14	14	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penanganan Bencana	-	-	-		Tidak Selaras		Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
3													Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-		Tidak Selaras		Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
4				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	Dokumen		1				1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
5			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2033	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
6				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	Dokumen		1	1	1	1	1	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
7			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		50	50	50	50	50	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
8				Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RAP) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2036	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
9													Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RAP) yang Disusun	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2037	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
10				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	1	1	1	1	1	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	-	-			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2038	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
11				Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelenaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RAP) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2039	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
12				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah ketelibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana/kaum rentan meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, penguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga		1	1	1	1	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
13				Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap pemrecanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan RAP melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan		1	1	1	1	1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
14				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah ketelibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga		1	1	1	1	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, dan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 tidak terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2029	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
15				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (EUFASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RAP)	Orang	0	50	50	50	50	50	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	0	30			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2043	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
16				Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memperhatikan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen	0	0	1	0	0	0	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	-	-			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2044	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
17				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2045	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras
18				Penguatan kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen	1	1	1	1	0	1	Dokumen Tata Kelola kelembagaan Bencana Daerah	-	-			Tidak Selaras		Data pada SIPD / E-Reviu Kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 tidak disajikan/dinput, sedangkan pada kolom (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029 terisaji data angka. Alkibatnya tidak dapat dilakukan pembandingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 dengan Target Sub Kegiatan (T0) Renstra 2025 s.d 2046	Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input data pada SIPDIX Reviu pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 sehingga dapat menjadi acuan dan diselaraskan dengan Target Sub Kegiatan (T0) pada RENSTRA 2025 – 2029	Tidak Selaras	Tidak Selaras	Tidak Selaras

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS/BADAN : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh	✓		-
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.	✓		Pohon kinerja agar tetap dilampirkan dalam renstra
3	*CASCADING* KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.	✓		*Cascading* kinerja agar tetap dilampirkan dalam renstra
4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.		✓	Sesuai sistematika dalam Inmendagri 2/2025, dalam bab IV belum ada menampilkan Tabel 4.4. sub kegiatan prioritas yang mendukung pembangunan daerah. Untuk pengisian tabel ini, program prioritas dapat mengambil dari Tabel 3.5.2. RPJMD, baru kemudian d sandingkan dengan sub kegiatan perangkat daerah yang digunakan untuk pelaksanaannya.
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas **KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA** sudah masuk pada RENSTRA PD.	✓		-
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	✓		Sesuai Inmendagri 2/2025, Tabel 2.1. Teknik menyimpulkan isu strategis agar tetap tampilkan dalam bab II renstra.
					Tabel 3.1. agar dibuat menyesuaikan dengan Tabel 3.3. dari sistematika dalam Inmendagri 2/2025. Sehingga fokus tujuan dan sasarannya adalah miliki renstra PD, bukan tujuan dan sasaran RPJMD.
					Hal 59-60 : Tujuan dan sasaran renstra agar sesuai dengan pohon kinerja dan cascading yang sudah dibuat. Tujuan renstra sebaiknya cukup 1 sesuai arahan dalam Inmendagri 2/2025.
					Tabel 4.1. : narasi tujuan dan sasaran perangkat daerah agar sesuai/sama dengan yang telah disajikan dalam pohon kinerja dan cascading
					Tabel 4.2. yang sesuai sistematika Inmendagri 2/2025 agar tetap ditampilkan dalam bab IV. Dalam Inmendagri 2/2025, Tabel 4.2. fokus pada program hingga sub kegiatan yang memang langsung terkait tujuan dan sasaran renstra PD, sedangankan Tabel 4.3 menyajikan semua program hingga sub kegiatan.
					Tabel 4.5. IKU PD dan Tabel 4.6. IKK agar tetap ditampilkan dalam bab IV. IKU merupakan indikator tujuan dan sasarana renstra PD, sedangkan IKK bisa berupa indikator outcome program.

Verifikator :
Nama : Endratomo Pambudi
NIP : 198912182010101002
Jabatan : Perencana Ahli Muda
TTD :

Mengetahui Kepala Bidang :
Nama : Chandra Fuji Asmara, ST., M.Eng
NIP : 197706032003121007
Jabatan : Kabid Pemeritahan dan Pembangunan Manusia
TTD :

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUN 2026

#bangga melayani bangsa



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

jdih.kalteng.go.id

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

jdih.kalteng.go.id

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

jdih.kalteng.go.id

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

jdih.kalteng.go.id

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
(2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
(3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendahuluan;
    b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
    c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
    e. Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
    1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
    2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
    3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
        a. RSUD Doris Sylvanus;
        b. RSJ Kalawa Atei; dan
        c. RSUD Hanau.
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
    5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

jdih.kalteng.go.id

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

jdih.kalteng.go.id

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
    a. Biro Administrasi Pimpinan;
    b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
    c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    d. Biro Hukum;
    e. Biro Perekonomian;
    f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
    g. Biro Administrasi Pembangunan;
    h. Biro Organisasi; dan
    i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

jdih.kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan penyertaan-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas Tahun 2026 yang berbasis kinerja bagi setiap Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dan kegiatan lebih terarah kepada tujuan yang akan dicapai. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas/kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menerapkan proses kegiatan, fungsi manajemen dan administrasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Secara efektif dan efisien serta memberikan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan, terutama dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

[illegible], S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790319 199711 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan Capaian Renstra PD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 58

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 77

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 102

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 116

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 127

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 127

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 131

3.3 Program dan Kegiatan 133

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 150

BAB V PENUTUP..... 164

3.1 Catatan Penting..... 164

3.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 164

3.3 Rencana Tindak Lanjut 165

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Kalimantan Tengah mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha. Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2016 mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pendudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pendudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk Perangkat Daerah yang menangani Bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran yaitu tupoksi terkait penanganan kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakana langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses peyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1;
6. Memperhatikan dinamika yang berkembang yakni hasil dari Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUS, PPAS, dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20039 Nomor 17 Seri -E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Gubernur No 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan tercapai sebesar **96,87%,** terdiri dari :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan APBD TA 2024

Belanja	Pagu Belanja	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Rp	%	%
Belanja Operasi	51.493.390.743	48.804.443.554	94,78	95,00
Belanja Modal	49.283.950.336	48.772.815.335	98,62	99,00
Realisasi Keuangan APBD	**100.777.341.079**	**97.577.258.890**	**96,87**	**97,00**

1. Belanja Operasi

Belanja operasi pagu sebesar Rp. 51.493.390.743,- dapat direalisasikan sebesar Rp 48.804.443.554,- digunakan untuk:

a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 42 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar Rp. 6.671.858.069,- (91,30%) dari anggaran Rp. 7.088.442.481,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 416.584.412,- (8,70%). Efisiensi belanja dipengaruhi oleh penyesuaian jumlah kebutuhan belanja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan Tunjangan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS yang tersisa anggaran lebih besar dari belanja lainnya yakni sebesar Rp. 265.109.300,-.
b. Belanja Operasi sebesar Rp. 51.493.390.743,- juga untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 48.804.443.554,- (94,78%) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.688.947.189,- (5,22%). Hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih rendah, dan terdapat 2 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan Realisasi keuangan terserap sebesar Rp. 48.772.815.335,- (98,62%) dari anggaran Rp. 49.283.950.336,- dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 511.135.001,- (1,38%).

Capaian Realiasi RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terhadap RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel eveluasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Akhir Periode 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	10=(10/4)
	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
	-									
1.05.03.1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Pra Bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
							100			**100**
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Tersedianya informasi dan edukasi menghadapi bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	6 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	5 dok	83
1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Jumlah Kabupaten Kota yang sudah terfasilitasi peringatan dini bencana	4 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	3 Paket	75
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Terlaksananya kesiagaan menghadapi bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	5 Tahun	87

1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	4 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		1 Keg	3 Keg	75
	2. Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.		**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	5 Tahun	83
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	4 Tahun	83
1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	6 Dok	60
1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	60
	3. Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penangggulangan bencana.			**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pemenuhan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	5 Tahun	83
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	840 Buah	240 Buah	200 Buah	200 Buah	100	200 Buah	640 Buah	76
	4. Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon.			**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase pendampingan penanganan pasca bencana**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan pemulihan pascabencana dengan terencana, cepat, dan terkaji sesuai kebutuhan dan ketersedian dokumen risiko bencana**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75

1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	5. Meningkatkan fungsi kelembagaan.		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Terselenggaranya fungsi kelembagaan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya penguatan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100**
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembangaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	6 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	5 Lembaga	83
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	25 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100	5 Lembaga	15 Lembaga	60
	6. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.		10 Org	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	100	**10 Orang**	10 Orang	100
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Tersedianya SDM Terampil**	**10 Org**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**100**	**10 Orang**	**10 Orang**	**100**
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tersedianya SDM Terampil Penanggulangan Bencana**	**10 Org**	**0**	**10 Org**	**10 Org**		**10 Org**	**10 Org**	**100**
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75

1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga		Keluarga	Keluarga	0
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Tersedianya SDM Terampil Penanggulangan Bencana**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**100**	**10 Org**	**10 Org**	**100**
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	60
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	21 Tim	12 Tim	3 Tim	3 Tim	100	3 Tim	18 Tim	86
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	840 Buah	-	-	-		-	-	
	7. Penguatan regulasi penanggulangan bencana		**100%**	**0%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan**								
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3 Kegiatan	75
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100**

1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	100
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Tersusunnya Dokumen RPB dan Renkon Penanggulangan Bencana**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100**
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	100
1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	100
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Terlaksananya pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	50
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan AparaturPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	123 org	38 orang	20 orang	20 orang	100	25 Orang	83 Orang	68

1.05.04.1.01.04	Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dini	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	38 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	28 Jenis	74
1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dini	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	38 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	28 Jenis	74
1.05.04.1.01.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan danEvakuasi	42 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	12 Jenis	30 Jenis	71
1.05.04.1.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	42 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100	10 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	71
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	80
1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyakarat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	22 Keg	4 Keg	5 Keg	4 Keg	100	6 Keg	15 Keg	68

1.05.04.1.01.11	Penyelengaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	4 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	3 Keg	75
1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.04.1.01.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga		Keluarga	Keluarga	
1.05.04.1.02	**Pembinaan dan Pegawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**100%**	**0%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100**
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelengaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keterlaksanaa**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok	12 Dok	4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	20 Dok	83
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83

1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dok	9 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	15 Dok	83
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	5 Tahun	83
1.05.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
1.05.1.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	75

1.05.1.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan								
1.05.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	72 Dok	36 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	60 Dok	83
1.05.1.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Dok		1 Dok			1 Dok	2 Dok	67
1.05.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.03.01	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
1.05.1.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
1.05.1.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								

1.05.1.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75
1.05.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83
1.05.1.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								
1.05.1.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanannya Kebersihan Kantor	4 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	3 tahun	75
1.05.1.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	4 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	3 tahun	75
1.05.1.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	4 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	3 tahun	75
1.05.1.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
1.05.1.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
1.05.1.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
1.05.1.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
1.05.1.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
1.05.1.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
1.05.1.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman									
1.05.1.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah									
1.05.1.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	7 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	43
1.05.1.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas/operasi	24 Unit		8 unit			8 unit	16 unit	67
1.05.1.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas									
1.05.1.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor									

1.05.1.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas									
1.05.1.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor									
1.05.1.1.03.26	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Mebeluer	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	75
1.05.1.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan									
1.05.1.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas									
1.05.1.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75
1.05.1.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan									
1.05.1.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional									
1.05.1.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas									
1.05.1.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor									
1.05.1.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas									
1.05.1.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor									
1.05.1.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer									
1.05.1.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan									
1.05.1.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas									
1.05.1.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor									
1.05.1.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan									
1.05.1.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional									

1.05.1.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**									
1.05.1.1.04.01	Perencanaan Pengeloaan Distribusi Daerah									
1.05.1.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Restribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.05	Pengelolaan Data Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.06	Penetapan Wajib Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah									
1.05.1.1.04.08	Pemindahan Tugas PNS									
1.05.1.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal									
1.05.1.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
1.05.1.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
1.05.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4 Paket	80
1.05.1.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75

1.05.1.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	4 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	4 Tahun	67
1.05.1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								83
1.05.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83

1.05.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								83
1.05.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	13 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	9 Unit	69
1.05.1.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	12 Unit	75
1.05.1.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	50
1.05.1.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75
1.05.1.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75

1.05.1.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	5 Tahun	83
1.05.1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
1.05.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	93
1.05.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	93
1.05.1.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.05.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1.05.1.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	108 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit		27 Unit	87 Unit	81
1.05.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162 Unit	108 Unit	27 Unit	27 Unit	100	27 Unit	135 Unit	93

1.05.1.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya								
1.05.1.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya								
1.05.1.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								
1.05.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	83
1.05.1.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75
1.05.1.1.09.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	75

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Secara singkat keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja TA 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase penanganan pra bencana
2	Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan menangani bencana	Persentase penanganan darurat bencana
3	Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran logistik dan peralatan
4	Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana
5	Meningkatkan fungsi kelembagaan	Terselenggaranya fungsi kelembagaan
6	Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana	Tersedianya SDM terampil
7	Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Persentase penyelesaisan dokumen kebencanaan
8	Penunjang urusan perangkat daerah	Persentase keterlaksanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melaksanakan telah melaksanakan **3** (tiga) Program, **14** (empat belas) kegiatan dan **64** (enam puluh empat) sub kegiatan yang didukung oleh dana PAD/DAU dan DBH-DR Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (termasuk belanja tidak langsung) sebesar **Rp. 100.727.341.079**,-. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Sumber Dana

No.	SUMBER DANA	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	DBH-DR	70.410.917.549	
2	PAD/DAU	30.316.423.530	
	PAGU TOTAL	**100.727.341.079**	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penanganan Pra Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan PB pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana, terdapat potensi bencana, telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran utama dari kegiatan dibidang penanggulangan bencana, antara lain adalah Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota, Publikasi informasi berbasis website, Dokumen Data dan Informasi Kejadian dan Potensi Bencana Kabupaten/ Kota, dan Pengembangan tata kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan maksud meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya serta dunia pendidikan, dalam pengurangan risiko bencana, koordinasi dan konsolidasi potensi bencana melalui pemantauan dan penyebaran informasi; memberikan informasi jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah beserta karakteristiknya, memberikan informasi distribusi lokasi-lokasi rawan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdapat informasi kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mempertimbangkan dengan adanya Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) lintas Kabupaten/ Kota dapat berperan dalam proses koordinasi tidak hanya pra bencana saja, tetapi saat terjadi bencana dan juga pasca bencana, sehingga F-PRB juga memiliki peran dan fungsi signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, termasuk kejadian Karhutla di Kalteng.

Selain untuk koordinasi pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian, forum ini juga bisa melakukan penggalangan dana bencana. Pasalnya jika lembaga lain ingin mengumpulkan dana untuk penanggulangan bencana, terkadang belum kredibel. Sebabnya apabila Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) dibentuk, maka akan lebih kredibel karena di dalamnya melibatkan masyarakat, NGO, dunia usaha, pemerintah dan juga akademisi. Maksud Pengembangan Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng adalah menciptakan dan memfasilitasi wadah atau semacam paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuannya adalah meningkatkan percepatan upaya pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dengan memfasilitasi para pemain kunci yang di dalamnya SKPD, lembaga ilmiah, dan akademisi, LSM, PMI, Lembaga Usaha, pemberi opini, kelompok budaya, dan sektor lain yang terikat erat dengan tujuan Pengurangan Risiko Bencana, bahkan lembaga donor dan organisasi internasional yang memiliki proyek dan kontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Hasil kegiatan Pengembangan Tata Kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng ini akan diterima secara langsung oleh instansi pemerintah daerah dan dunia usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah daerah dan lembaga usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengembangkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 501.296.274**,- dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 310.310.688**,- (61,90%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 190.985.586**,- (38,10%).

Penyerapan anggaran hanya 61,90% dikarenakan pada :

1) Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana karena melibatkan Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan maka sering kali perencanaan jadwal kegiatan tidak sesuai dengan kesiapan Kabupaten/kota sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.
2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan realisasi 93,62%. Sub Kegiatan ini sudah terlaksana dengan maksimal.
3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi 0%, Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak dilaksanakan karena Dokumen Rencana Kontingensi sebagai dasar skenario Gladi baru selesai disusun di bulan desember sehingga tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

B. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

1) Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana.
2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Tabel 2.5
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**501.296.274**	**501.296.274**	**310.310.688**	**61,90**	
1)	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**280.000.000**	**280.000.000**	**234.198.210**	**83,64**	
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	280.000.000	280.000.000	234.198.210	83,64	
2)	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**221.296.274**	**221.296.274**	**76.112.478**	**34,39**	
a	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	81.298.274	81.298.274	76.112.478	93,62	
b	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	140.000.000	140.000.000	0	0	
Total		**501.296.274**	**501.296.274**	**310.310.688**	**61,90**	

2. Sasaran strategis 2

Sasaran strategis 2 Meningkatkan Ketanggapan, Ketangkasan dan Ketangguhan Menangani Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penanganan Darurat Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan menangani bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan, antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak, dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan darurat bencana.

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memobilisasi fasilitasi Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sebagai sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai bencana yang terjadi di Kalimantan Tengah. Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana (PB) baik kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sebagai hasil pertimbangan Kepala Daerah dalam menentukan langkah kegiatan penanggulangan bencana, maka dilaksanakan rapat koordinasi penetapan status bencana, dengan output berupa rekomendasi penetapan status bencana di daerah terdampak agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 33.930.492.725**,- dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 32.935.398.993**,- (97,07%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 995.093.732**,- (1,25%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapan realisasi Fisik dari kegiatan ini 98%.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
2) Respon cepat penanganan darurat bencana.
3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
5) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.

Tabel 2.7
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Ketanggapan, Ketangkasan dan Ketangguhan Menangani Bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**33.930.492.725**	**33.930.492.725**	**32.935.398.993**	**97,07**	
1)	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**33.930.492.725**	**33.930.492.725**	**32.935.398.993**	**97,07**	
a	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	42.540.000	42.540.000	35.997.200	84,62	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
b	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	138.025.725	138.025.725	137.815.572	99,85	
c	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	59.120.350	59.120.350	58.523.670	89,99	
d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	33.646.598.650	33.646.598.650	32.661.872.551	97,07	
e	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	44.208.000	44.208.000	41.190.000	93,17	
Total		**33.930.492.725**	**33.930.492.725**	**14.960.514.297**	**97,07**	

3. Sasaran strategis 3

Sasaran strategis 3 Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan Peralatan Penanggulangan Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penyaluran Logistik dan Peralatan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran logistik dan peralatan	Persen	100	100	100

Pengalaman empirik dan pendapat para pakar menunjukkan bahwa Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, banyak proses kegiatan kedaruratan dan logistik tentang pengadaan paket logistik penanggulangan bencana terkadang masih dianggap sebagai pekerjaan dan kegiatan yang sia-sia karena tidak memiliki parameter yang jelas serta terukur. Bantuan logistik untuk masyarakat dalam penanggulangan bencana ini dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar mampu bertahan dengan sadar berinisiatif serta untuk meringankan penderitaan korban yang terkena bencana.

Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat dalam dan luar negeri berupa bantuan logistik untuk penanggulangan bencana. Mengingat bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, serta tepat jumlah dan tepat kualitasnya, pada tahun 2024 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan dasar logistik dan peralatan, pelaporan pengadaan dan penyaluran logistik dan peralatan, serta pengelolaan logistik dan peralatan, sehingga kegiatan di seksi logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di tahun 2024 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah semakin eksis bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Bumi Tambun Bungai.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 1.943.786.590**,- dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.887.806.094**,- (97,12%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 56.070.496**,- (2,88%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapan realisasi Fisik dari kegiatan ini 98%.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Kegiatan Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

1) Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana.
2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tabel 2.9
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan Peralatan Penanggulangan Bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.943.786.590**	**1.943.786.590**	**1.887.806.094**	**97,12**	
1)	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**487.466.190**	**487.466.190**	**482.585.960**	**99,00**	
a	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	487.466.190	487.466.190	482.585.960	99,00	
2)	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.456.320.400**	**1.456.320.400**	**1.405.220.134**	**96,49**	
a	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.456.320.400	1.456.320.400	1.405.220.134	96,49	
Total		**1.943.786.590**	**1.943.786.590**	**1.887.806.094**	**97,12**	

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran strategis 4 Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Renaksi Rehab Rekon dan Efektivitas Rehab Rekon dengan sasaran indikator yaitu Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Perhitungan Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui *system* manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana *(Damage and Losses Assesment/DaLA)* untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas terkait dalam Penanggulangan Bencana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini diisi dengan rapat kecil dan observasi di lapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu upaya mencapai pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat pasca bencana adalah dengan cara berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait di Wilayah Provinsi Kalimantan tengah termasuk juga BNPB serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dijalankan.

Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program. Dimana, evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut, dan juga dapat mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan dapat terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 936.785.600**,- realisasi anggaran sebesar **Rp. 820.307.891**,- (87,57%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 116.447.709**,- (12,43%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini berhasil, terutama pada Sub Kegiatanan Penanganan Pasca Bencana Provinsi dengan realisasi mencapai 89,61% dan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Provinsi dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana cuma terserap realisasi sebesar 81,70%, dikarenakan ada beberapa pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana yang bertepatan dengan penetapan status Tanggap Darurat Karhutla dan berimbas kepada tidak bisanya berjalan kegiatan pengelolaan risiko bencana khususnya untuk luar daerah pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana, dan adanya selisih standar biaya dengan biaya yang di pertanggungjawabkan maka penyerapan anggaran tidak maksimal.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

1) Pengelolaan Risiko Bencana.
2) Penanganan Pasca Bencana Provinsi.
3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Provinsi

Tabel 2.11
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Renaksi Rehab Rekon dan Efektivitas Rehab Rekon

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**936.785.600**	**936.785.600**	**820.307.891**	**87,57**	
1)	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**250.000.000**	**250.000.000**	**204.258.842**	**81,70**	
a	Pengelolaan Risiko Bencana	250.000.000	250.000.000	204.258.842	81,70	
2)	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**686.785.600**	**686.785.600**	**616.049.049**	**89.70**	
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi	680.399.800	680.399.800	609.690.249	89,61	
b	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Provinsi	6.385.800	6.385.800	6.385.800	100,00	
Total		**936.785.600**	**936.785.600**	**820.307.891**	**87,57**	

5. Sasaran strategis 5

Sasaran strategis 5 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Terselenggaranya fungsi kelembagaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Fungsi Kelembagaan	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	Persen	100	100	100

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 357.000.000**,- dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 218.958.540**,- (61,33%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. **138.041.460**,- (38,67%).

Penyerapan anggaran hanya 61,33% dikarenakan pada Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah dan Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Penyelesaian kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, sinkronisasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan narasumber menjadi salah satu kendala sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintahan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya karena naskah kerjasama masih berproses di Biro Pemerintahan dan belum ditanda tangani Gubernur.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

1) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah.
2) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.13
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Fungsi Kelembagaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**357.000.000**	**357.000.000**	**218.958.540**	**61,33**	
1)	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**357.000.000**	**357.000.000**	**218.958.540**	**61,33**	
a	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	229.500.000	229.500.000	188.410.436	82,10	
b	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	127.500.000	127.500.000	30.548.104	23,96	
Total		**357.000.000**	**357.000.000**	**218.958.540**	**61,33**	

5. Sasaran strategis 6

Sasaran strategis 6 Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Perhitungan Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana	Tersedianya SDM terampil	Orang	10	10	100

Penanggulangan Bencana merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah, baik itu pada tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Penanggulangan bencana juga sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM sub urusan bencana terdiri atas tiga jenis pelayanan dasar, meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Ketiga pelayanan dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut paling sedikit memuat 13 rincian, yaitu penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Sejak tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Personil Penanggulangan Bencana, namun bagi BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah rata-rata belum terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan personil penanggulangan bencana dalam menanggulangi bencana di daerah masing-masing.

Dalam upaya mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan TRC dalam Penanggulangan Bencana (PB), maka pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan dukungan kegiatan dengan mengerahkan personil ke daerah terdampak bencana, melakukan koordinasi serta penanganan berupa pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, berkoordinasi dengan sektor terkait serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Tahun 2024 “Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024”.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC adalah kaki dan tangan bpbd dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, TRC juga harus dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan spasial sehingga dalam

melaksanakan tugasnya bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, khususnya tepat lokasi atau tempat.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 465.000.000**,- realisasi anggaran sebesar **Rp. 409.905.166**,- (89,89%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 55.094.834**,- (10,11%).

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, penyelesaian kegiatan sudah dilaksanakan hanya saja untuk peserta tidak datang seluruhnya sehingga untuk perjalanan dinas dalam kota tidak terserap dengan maksimal.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
2) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana

Tabel 2.15
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**465.000.000**	**465.000.000**	**409.905.166**	**89,89**	
1)	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**465.000.000**	**465.000.000**	**409.905.166**	**89,89**	

a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300.000.000	300.000.000	250.218.216	81,70	
b	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	165.000.000	165.000.000	159.686.950	96,89	
Total		**465.000.000**	**465.000.000**	**409.905.166**	**89,89**	

6. Sasaran strategis 7

Sasaran strategis 7 Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penyelesaisan Dokumen Kebencanaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Perhitungan Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Persentase penyelesaisan dokumen kebencanaan	Persen	100	100	100

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kategori Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun 3 dokumen kebencanaan antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi. Penyelesaian Dokumen Kebencanaan yang telah disusun sampai dengan tahun berjalan 2024 sebanyak 2 dokumen dari 3 dokumen yang harus terselesaikan yakni Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi 2020-2024 dan Dokumen Rencana Kontijensi (Kebakaran Hutan dan Lahan) 2023-2027. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi sampai saat ini belum diselesaikan masih berupa bentuk draft

di karenakan pelaksanaan tahun 2024 tidak sempat dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, sudah ditindak lanjut dengan permohonan data dari instansi terkait, namun masih belum terpenuhi untuk data dan tidak bisa dilakukan finalisasi untuk tahapan selanjutnya, yang mengakibatkan tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu. Adapun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sendiri sudah berakhir periode 2018-2022.

Untuk Dokumern Rencana Kontijensi (Banjir), Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi baru sampai pada tahap penyusunan dokumen rencana kontingensi saja, masih ada beberapa tahapan yang tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena keterbatasan waktu.

Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah, sudah sampai pada tahapan Harmonisasi dengan Biro Hukum dan sudah dalam proses produk hukum daerah yang didaftarkan pada kemendagri, namun masih belum dilegalisasi oleh kepala daerah, yang mengakibatkan tidak bisa diterbitkan dan diekspos dan uji publik sampai berakhirnya tahun 2024.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 1.303.840.374**,- realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.066.226.173**,- (81,77%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar **Rp. 237.615.201**,- (18,23%).

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana dan Rawan Kebakaran, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

Program Penanggulangan Bencana :

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
2) Penyusunan Rencana Kontijensi.
3) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah.

4) Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran :

1) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
2) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
3) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4) Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.
5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi.
7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

Tabel 2.17
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan fungsi kelembagaan dan Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**426.119.000**	**426.119.000**	**279.304.025**	**65,55**	
1)	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**300.000.000**	**300.000.000**	**189.053.125**	**50,98**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000	50.000.000	0	44,17	
b	Penyusunan Rencana Kontijensi	250.000.000	250.000.000	189.053.125	60,06	
2)	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**126.119.000**	**126.119.000**	**90.250.900**	**71,56**	
a	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000	50.000.000	14.700.900	29,40	
b	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	76.116.000	76.116.000	75.550.000	99,26	
2	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**877.721.374**	**877.721.374**	**786.922.148**	**89,66**	
1)	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**783.659.374**	**783.659.374**	**711.763.008**	**90,83**	
a	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	63.750.000	63.750.000	60.542.180	94,97	
b	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	92.044.730	92.044.730	83.276.460	90,47	
c	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	125.000.000	125.000.000	105.494.564	84,40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota					
d	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	44.602.400	44.602.400	44.463.544	99,69	
e	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	78.835.464	78.835.464	65.761.530	83,42	
f	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	38.105.940	38.105.940	17.489.794	45,90	
g	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	299.820.574	299.820.574	298.128.400	99,44	
2)	**Pembinaan dan Pegawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**94.062.000**	**94.062.000**	**75.159.140**	**79,90**	
a	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	44.062.000	44.062.000	31.980.000	72,58	
b	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000	50.000.000	43.179.140	86,36	
Total		**1.303.840.374**	**1.303.840.374**	**1.066.226.173**	**81,77**	

8. Sasaran strategis 8

Sasaran strategis 8 Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja ini merupakan penjabaran dari kegiatan rutin kantor yang diperlukan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kantor melalui dukungan pemenuhan operasional kantor yang memadai pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 12 bulan 1 Tahun. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18
Perhitungan Kinerja Sasaran 8

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penunjang urusan perangkat daerah	Persentase keterlaksanaan	Persen	100	100	100

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah **Rp. 10.032.329.096**,- realisasi anggaran sebesar Rp. **9.167.588.738**,- (91,38%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. **864.740.358**,- (8.62%). Adapun serapan rendah yakni pada pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi di bawah 80%, hal ini dikarenakan Pembayaran tagihan Listik, Telepon dan Air biaya opersional pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet kantor sesuai dengan kebutuhan pembayaran rutin di kantor.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
e) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
e) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 2.19
Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Penunjang urusan perangkat daerah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**61.188.088.516**	**61.188.088.516**	**59.827.606.545**	**97,78**	
1)	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**620.000.000**	**620.000.000**	**547.427.749**	**88,29**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000	280.000.000	249.022.323	88,94	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	14.112.540	94,08	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	13.738.415	91,59	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	13.929.500	92,86	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	14.242.525	94,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	28.274.795	94,25	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	214.107.651	85,64	
2)	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**165.084.474**	**165.084.474**	**162.317.483**	**98,32**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.088.442.481	7.088.442.481	6.471.858.069	91,30	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	568.350.775	568.350.775	566.240.450	99,63	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.244.533	1.244.533	1.044.800	83,95	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.649.058	1.649.058	1.375.950	83,44	
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.780.000	20.780.000	17.504.280	84,24	
3)	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**165.084.474**	**165.084.474**	**162.317.483**	**98,32**	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.364.650	5.364.650	4.792.900	89,34	
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.364.650	5.364.650	4.791.150	89,31	
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	154.355.174	154.355.174	152.733.433	98,95	
4)	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**67.495.114**	**67.495.114**	**63.637.676**	**94,28**	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	48.529.076	97,06	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.495.114	17.495.114	15.108.600	86,36	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5)	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12.320.700.972**	**12.320.700.972**	**12.128.222.458**	**98,44**	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.184.886	45.184.886	45.114.500	99,84	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.832.437.280	11.832.437.280	11.641.753.400	98,39	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.878.806	38.878.806	38.850.000	99,93	
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.000.000	31.000.000	29.360.000	94,71	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.950.000	22.950.000	22.906.000	99,81	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.250.000	350.250.000	350.238.558	100,00	
6)	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.022.949.819**	**36.022.949.819**	**35.750.260.727**	**99,24**	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.142.775.136	33.142.775.136	32.884.624.898	99,22	
b	Pengadaan Mebel	400.174.683	400.174.683	400.100.000	99,98	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.480.000.000	2.480.000.000	2.465.535.829	99,42	
7)	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.982.447.933**	**1.982.447.933**	**1.825.597.023**	**92,09**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	14.000.000	93,33	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.326.739	366.326.739	291.127.159	79,47	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.601.121.194	1.601.121.194	1.520.469.864	94,96	
8)	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.328.943.357**	**2.328.943.357**	**2.292.119.880**	**98,42**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	340.000.000	340.000.000	324.056.500	95,31	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	49.990.000	99,98	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.938.943.357	1.938.943.357	1.918.073.380	98,92	
	Total	**61.188.088.516**	**61.188.088.516**	**59.827.606.545**	**97,78**	

Tabel 2.20
Perbandingan Perhitungan Kinerja Sasaran dengan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2024				Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	
Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan menangani bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	
Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran logistik dan peralatan	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2024				Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	
Meningkatkan fungsi kelembagaan	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	Bulan	12	12	100	Bulan	12	12	100	
Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana	Tersedianya SDM terampil	Orang	10	10	100	Orang	10	10	100	
Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Persentase penyelesaisan dokumen kebencanaan	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	
Penunjang urusan perangkat daerah	Persentase keterlaksanaan	Persen	100	100	100	Persen	100	100	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Sasaran PD/Program/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keg (Output) dan Sub Kegiatan	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Catatan Analis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	-													
1.05.03.1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Pra Bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Tersedianya informasi dan edukasi menghadapi bencana**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	6 dok	1 dok	1 dok	
1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Jumlah Kabupaten Kota yang sudah terfasilitasi peringatan dini bencana					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Terlaksananya kesiagaan menghadapi bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan					2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	4 Keg	2 Keg	1 Keg	
	2. Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.				100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas					1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok	2 Dok	2 Dok	
1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit					1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

	3. Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penangggulangan bencana.				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pemenuhan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana			30 Buah	10 Buah	200 Buah	200 Buah	200 Buah	200 Buah	840 Buah	200 Buah	200 Buah	
	4. Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon.				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase pendampingan penanganan pasca bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan pemulihan pascabencana dengan terencana, cepat, dan terkaji sesuai kebutuhan dan ketersedian dokumen risiko bencana**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	

1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Meningkatkan fungsi kelembagaan.				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Terselenggaranya fungsi kelembagaan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya penguatan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana**			**12 Bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembangaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	6 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	25 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	
	6. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.				10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Org	10 Orang	10 Orang	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Tersedianya SDM Terampil**			**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**10 Org**	**10 Orang**	**10 Orang**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tersedianya SDM Terampil Penanggulangan Bencana**			**10 Org**	**0**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	

1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Tersedianya SDM Terampil Penanggulangan Bencana**			**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	**10 Org**	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana			7 Tim	2 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	21 Tim	3 Tim	3 Tim	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana			0	-	-	-	-	-	840 Buah	-	-	
	7. Penguatan regulasi penanggulangan bencana				0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan**			**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan**												

1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi**			**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					1 Dok		1 Dok		2 Dok		1 Dok	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Tersusunnya Dokumen RPB dan Renkon Penanggulangan Bencana**			**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Terlaksananya pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	

1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan AparaturPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				18 orang	20 orang	25 Orang	25 Orang	35 Orang	123 org	25 Orang	25 Orang	
1.05.04.1.01.04	Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dini	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait					8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	38 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	
1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dini	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	38 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	
1.05.04.1.01.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan danEvakuasi					8 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	42 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	
1.05.04.1.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					8 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	42 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	

1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyakarat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					4 Keg	5 Keg	6 Keg	7 Keg	22 Keg	5 Keg	6 Keg	
1.05.04.1.01.11	Penyelengaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)					1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	4 Keg	1 Keg	1 Keg	
1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.04.1.01.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	
1.05.04.1.02	**Pembinaan dan Pegawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	

1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelengaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keterlaksanaa**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	24 Dok	4 Dok	4 Dok	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	18 Dok	3 Dok	3 Dok	

1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
1.05.1.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan												
1.05.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	72 Dok	12 Dok	12 Dok	

1.05.1.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.1.1.03.01	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
1.05.1.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
1.05.1.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
1.05.1.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok	1 Dok	1 Dok	
1.05.1.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD												
1.05.1.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanannya Kebersihan Kantor					1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	
1.05.1.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja					1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	
1.05.1.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	
1.05.1.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
1.05.1.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

1.05.1.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
1.05.1.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
1.05.1.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
1.05.1.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
1.05.1.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman													
1.05.1.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah													
1.05.1.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan					1 unit	1 unit	3 unit	2 unit	7 Unit	1 unit	3 unit	
1.05.1.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas/operasi						8 unit	8 unit	10 unit	24 Unit	8 unit	8 unit	
1.05.1.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas													
1.05.1.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor													
1.05.1.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas													
1.05.1.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor													
1.05.1.1.03.26	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Mebeluer					1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	
1.05.1.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan													
1.05.1.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas													
1.05.1.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor					1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.1.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan													
1.05.1.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional													
1.05.1.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas													
1.05.1.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor													
1.05.1.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas													

1.05.1.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor													
1.05.1.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer													
1.05.1.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan													
1.05.1.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas													
1.05.1.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor													
1.05.1.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan													
1.05.1.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional													
1.05.1.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**													
1.05.1.1.04.01	Perencanaan Pengeloaan Distribusi Daerah													
1.05.1.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Restribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.05	Pengelolaan Data Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.06	Penetapan Wajib Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah													
1.05.1.1.04.08	Pemindahan Tugas PNS													
1.05.1.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal													
1.05.1.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
1.05.1.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

1.05.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.1.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	

1.05.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
1.05.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												
1.05.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	

1.05.1.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					4 Unit	2 Unit	2 Unit	5 unit	13 Unit	2 Unit	2 Unit	
1.05.1.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	16 Unit	4 Unit	4 Unit	
1.05.1.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	
1.05.1.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan					1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.1.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.05.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

1.05.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
1.05.1.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	108 Unit	27 Unit	27 Unit	
1.05.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	162 Unit	27 Unit	27 Unit	
1.05.1.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												
1.05.1.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yangDipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												
1.05.1.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
1.05.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

1.05.1.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.05.1.1.09.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

A. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah :

1. Tingkat kerawanan bencana di Kalimantan Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kalteng.
2. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah.
3. Belum ada regulasi berupa Peraturan Daerah Kalteng tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana.
5. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk

penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan.

6. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana.
7. Sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas.
8. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan.
9. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak.
10. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah.
11. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah.
12. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan.
13. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

B. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2026-2029, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah ***"MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT KHUSUSNYA MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH UMUMNYA (MANGGATANG UTUS), DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG MAJU, MODERN, BERMARTABAT, DAN***

BERKAH, MENUJU INDONESIA EMAS 2045". Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah:

1. **Kalteng Maju**. Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
2. **Kalteng Modern**. Kata Modern memberikan gambaran bahwa tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang modern, dengan penggunaan teknologi, kultur pelayanan publik yang benar-benar melayani, dan program-program yang memiliki paradigma modern. Harapannya, masyarakat akan merasakan dampak pembangunan secara lebih nyata, efektif, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia.
3. **Kalteng Bermartabat**. Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.
4. **Kalteng Berkah**. Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antarperiode di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Misi

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2026-2029 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. **MISI PERTAMA**: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam local.
   Misi pertama dalam pembangunan berkaitan dengan aspek ekonomi. Aspek ini menjadi penting di dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang sama dan merata serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya dalam memastikan kesejahteraan tersebut dicapai diharapkan berasal dari dua transmisi, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan yang dibelanjakan untuk menyasar pada masyarakat afirmasi melalui upaya perlindungan sosial oleh pemerintah. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam lokal berarti upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
   Dalam konsep kesejahteraan ekonomi, setidaknya ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, kualitas SDM masyarakat yang menjadi modal untuk menghasilkan produktivitas. Produktivitas masyarakat yang tinggi akan berkaitan erat dengan imbalan secara pendapatan yang akan diterimanya. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan menunjukkan kapasitas seseorang untuk mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kedua, kualitas belanja masyarakat untuk kebutuhan pokok yang terstandar dan berkualitas. Ini berarti bahwa belanja yang dilakukan oleh masyarakat menyasar pada produk-produk yang bervariasi dengan memperhatikan kualitas barang atau jasa yang dibeli.
2. **MISI KEDUA**: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat.
   Misi kedua berkaitan dengan aspek pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap memprioritaskan etika sebagai standar perilaku. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, setiap orang berhak untuk dapat mengakses layanan tersebut sebagai bentuk inklusivitas bahwa setiap

masyarakat, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan, berhak menerima pendidikan yang berstandar dan berkualitas. Ini akan berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah secara merata, dukungan tenaga pengajar yang berkualitas, dan pembiayaan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah daerah. Spirit belom bahaday atau hidup bertata krama atau sopan santun akan menjiwai setiap proses pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. **MISI KETIGA**: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.

   Dengan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerataan pembangunan menjadi konsep yang penting untuk diterapkan. Pemerataan infrastruktur di setiap wilayah ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas manusia, barang, maupun jasa dapat terjadi secara lebih efisien dan proses mobilitas yang lancar ini mampu menjadi katalisator pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerataan pembangunan infrastruktur ini kemudian akan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu hal penting dalam proses pembangunan ini adalah integrasi wawasan lingkungan dalam pembangunan. Ini diterapkan melalui upaya konservasi lingkungan hingga pengendalian pencemaran atau polusi yang sifatnya komprehensif sehingga tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan.

4. **MISI KEEMPAT**: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social.

   Untuk meningkatkan kualitas SDM, aspek kesehatan menjadi krusial karena menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi untuk pembangunan. Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, kualitas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, ketersediaan alat dan obat yang diperlukan untuk pelayanan, hingga upaya pembiayaan kesehatan. Seluruh pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dari keadilan sosial yang diwujudkan pemerintah dalam bidang kesehatan.

5. **MISI KELIMA**: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

   Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dimaknai sebagai penjiwaan atas budaya lokal yang diintegrasikan dalam proses pengambilan kebijakan maupun implementasi program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini akan berkaitan dengan reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang baik, peningkatan kerukunan umat beragama, hingga pengembangan dan pemajuan kebudayaan lokal. Misi ini menjadi upaya secara internal pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berbudaya, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tabel 2.22

Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kode Sasaran	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja Utama RPJMD
M1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	T1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan	Indeks daya saing daerah	3,13	3,23	3,34	3,44	3,54	3,64	S1	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)
				Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (%)
											S2	Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi	Tingkat inflasi (%)
													Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)

													Ekspor barang dan jasa (% PDRB)
		T2	Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru	PDRB per Kapita (Rp Juta)	85,3	95,0	104,7	114,4	124,0	134,0	S3	Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
				Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	6,03	6,46	6,88	7,30	7,4			Tingkat pengangguran terbuka (%)
													Indeks kapabilitas inovasi
													Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
													Indeks ekonomi hijau daerah

											S4	Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah nonpertanian pada level provinsi (%)
													Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)
													Rasio kewirausahaan (%)
													Persentase desa mandiri (%)
		T3	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	2,52	S5	Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	Total kredit terhadap PDRB (%)

M2	Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat	T4	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau.	Indeks Modal Manusia	0,550	0,553	0,565	0,578	0,590	0,603	S6	Terwujudnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk : 1) Literasi Membaca
													2) Numerasi
													Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk : 1) Literasi Membaca
													2) Numerasi

											S7	Meningkatnya kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis digitalisasi dan penguatan kurikulum berbasis budaya Dayak	Indeks Literasi Digital
											S8	Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau	Proporsi Sekolah dengan akses ke: a) listrik b) internet untuk tujuan pengajaran c) komputer untuk tujuan pengajaran d) air minum layak e) fasilitasi sanitasi dasar per jenis kelamin f) fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)
											S9	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

											S10	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi	Indeks pembangunan literasi masyarakat
													Indeks ketimpangan gender
M3	Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	T5	Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	59,87	60,26	61,43	62,82	63,76	64,89	S11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif	Rumah tangga dengan akses hunian layak/terjangkau/dan berkelanjutan (%)
											S12	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Kapasitas air baku (m3/detik)
											S13	Berkembangnya konektivitas wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)

												serta infrastruktur digital	
													Panjang Jalan Provinsi Terbangun (Km)
													Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
											S14	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur sanitasi dan air minum	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
													Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
											S15	Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan	Komunikasi Listrik per Kapita (kWh)
													Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)

													Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
													Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)
		T6	Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,34	76,51	76,68	76,84	77,01	77,18	S16	Tercapainya pengurangan kejadian degradasi lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi karbon	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
													Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca
											S17	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
											S18	Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.	Indeks Risiko Bencana
M4	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	T7	Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,43	74,63	74,91	75,15	75,40	75,70	S19	Meningkatnya jumlah dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes)

	sebagai keadilan sosial		terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah										
													Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna
											S20	Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
													Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita) (%)
M5	Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan,	T8	Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,12 - 62,24	62,71 - 62,83	63,30 - 63,43	63,90 - 64,02	64,41 - 64,69	65,08 - 65,20	S21	Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial,	Indeks Kerukunan Umat Beragama

	serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045		berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial									pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan	
													Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
											S22	Memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif	Rasio Indeks Gini
		T9	Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan	Indeks Demokrasi Indonesia	80,02 - 83,28	80,26 - 83,52	80,50 - 83,77	80,75 - 84,01	81,00 - 84,25	81,24 - 84,50	S23	Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Dayak dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat
											S24	Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
													Indeks Integritas Nasional

													Nilai Pilar Pemerintah Indeks Transformasi Digital
		T10	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi	Rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention (%)	84,00	84,75	85,50	86,25	87,00	87,75	S25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi
													Nilai SAKIP
													Nilai maturitas SPIP
													Indeks reformasi hukum
													Indeks pelayanan publik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana memiliki keterkaitan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai misi nomor 3 (Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan) sehingga memiliki tanggung jawab dengan tugas, pokok, dan fungsi sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah:

a. perumusan kebijakan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
c. penyusunan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
d. penyusunan prosedur operasional tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
e. penyelenggara penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
g. perumusan kebijakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
i. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dampak terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional seperti Desa / Kelurahaan yang tangguh Bencana adalah meningkatnya cakupan pelayanan bencana, menurunnya tingkat kerugian material dan jiwa akibat bencana dan meningkatnya desa/kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan program penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah antara lain:

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan yaitu:

a. Tingkat kerawanan bencana di Kalimantan Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kalteng;
b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
c. Belum ada regulasi berupa Peraturan Daerah Kalteng tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
g. Sumberdaya manusia di BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;

k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang dikelola oleh OPD teknis lain. Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah antara lain:

1. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha.
2. Terbitnya UU no 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota.
3. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien.
4. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak.
5. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi.
6. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
7. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian/lembaga teknis. pemanfaaan sumberdaya milik sektor swasta
8. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.

9. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. lembaga nasional maupun internasional.
10. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1%) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat.
11. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan teknis, pelatihan, kursus, dan lainnya.
12. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik.
13. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik.
14. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana.
15. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

2.3.4 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kalimantan Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan angina puting beliung, yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi.
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun.
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi.

4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kalimantan Tengah akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negative terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak.
2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat.
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian.
4. Munculnya berbagai penyakit.
5. Korban jiwa, cidera, cacat.
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana Isu-isu strategis dalam penanggulanan bencana di Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
3. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai
    a. alat system peringatan dini (EWS)

b. rambu petunjuk jalur evakuasi
c. Papan Informasi

4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dan BPBD kab/Kota;
5. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB;
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Tengah;
7. Belum lengkapnya Peraturan Pelaksana, pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah;
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Kalimantan Tengah;
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kalimantan Tengah;
10. Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada masa pra dan pasca bencana;
11. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah.

Pencegahan dan penanggulangan bencana masuk kedalam rancangan prioritas nasional tentang pembangunan wilayah dan merupakan program prioritas nasional yaitu pengurangan kesenjangan wilayah dan penguatan konektivitas dan kemaritiman dengan program prioritas penanggulangan bencana. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada badan/instansi yang menangani kebencanaan untuk merancang program-program yang lebih terarah dan terkoordinatif. Begitu juga dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang harus peka melihat dan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat responsive (tanggap darurat) namun juga menitik beratkan pada Preventif atau pencegahan (siaga bencana).

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan kebencanaan yang diusung pemerintah pusat saat ini yaitu penanganan bencana yang bersifat reaktif yaitu bertindak pada saat terjadi bencana telah berubah menjadi pengelolaan bencana secara manajerial.

Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana saat ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Keterkaitan Isu-isu Strategis

No	Bidang	Masalah	Isu
1.	Sekretariat	1. Minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Penanganan bencana kurang rensponsif
		2. Kondisi sarana prasarana kebencanaan belum memadai	Jumlah informasi kebencanaan daerah masih rendah
		3. Minim kualitas dan kuantitas tenaga adminitrasi	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi
2.	Bidang Kesiapsiagaan dan pencegahaan	1. Minimnya jumlah tenaga teknis yang mampu melakukan analisis kebencanaan	Pemerintah belum mampu melakukan pemataan daerah rawan bencana secara komprehensif
		2. Minimnya jumlah sarana prasarana komunikasi kebencanaan	Penangangan bencana oleh pemerintah bersifat sektoral
		3. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana	Penanggulangan bencana belum mengakomodir kearaifan lokal
3.	Bidang Kedarurat dan Logistik	1. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga teknis kedaruratan dan logistik	Pemerintah belum sigap pada kejadian bencana
		2. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya Penanganana Darurat	Penanganan darurat bencana tidak koordinatif
		3. Minimnya sarana evakuasi	Kemampuan BPBD dalam mengevakuasi korban sangat rendah
		4. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) penanggulangan Bencana yang optimal	Penaganan bencana saat tanggap darurat masih ego sektoral
4.	Bidang Rehabilitasi dan Renkonstruksi	1. Minimnya kualitas dan kuantitas tenaga teknis analisis dampak bencana	Banyak korban bencana tidak mendapatkan

			bantuan pada tahap pasca bencana
		2. Minimnya regulasi daerah dalam mendukung upaya penanganan dampak bencana	Penangan pasca bencana oleh BPBD sangat lambat
5.	Bidang Pemadam Kebakaran dan Pengendalian Operasi	1. Minimnya Personel dalam melakukan Pemadam Kebakaran	Baru dibentuknya Bidang Pemadam Kebakaran dan Pengendalian Operasi sehingga belum mamadainya personel yang profesional dibidangnya

Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana saat ini dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini :

1. Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana maka semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi. Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan untuk kebencanaan tanpa adanya tumpang tindih.
3. Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.
4. Perlu adanya suatu database kebencanaan yang dibangun secara terkoordinatif dan tranparan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2026-2029, memperhatikan kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2026-2029, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2026-2029 guna keselarasan dengan prioritas Pembangunan Nasional. Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (2026-2029).

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknikratik, partisifatif, bottom up dan top down. Keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Demikian halnya program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat pada Rancangan Awal RKPD sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.24
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.806.773.068,74**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.806.773.068,74**	
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**38.806.773.068,74**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**38.806.773.068,74**	
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kalimantan Tengah**			**16.681.773.068,74**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kalimantan Tengah**			**16.681.773.068,74**	
1.5.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**890.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**890.000.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	

1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000,00	
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	14 Data	50.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	14 Data	50.000.000,00	
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000,00	

1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	
1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	75.000.000,00	
1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	75.000.000,00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	75.000.000,00	
1.05.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Kalimantan Tengah	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	14 Substansi	-	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Kalimantan Tengah	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	14 Substansi	-	
1.5.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**10.951.773.068,74**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**10.951.773.068,74**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	10.066.773.068,74	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	10.066.773.068,74	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	800.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	800.000.000,00	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	

1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.5.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**230.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**230.000.000,00**	
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	
1.5.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**180.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**180.000.000,00**	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	

1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	100.000.000,00	
1.5.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**840.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**840.000.000,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000,00	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	400.000.000,00	
1.5.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**700.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**700.000.000,00**	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	

1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	500.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	500.000.000,00	
1.5.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**1.090.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**1.090.000.000,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	475.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	475.000.000,00	
1.5.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**1.800.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			**1.800.000.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	1.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	1.000.000.000,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	100.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	700.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	700.000.000,00	
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kalimantan Tengah**			**22.125.000.000,00**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kalimantan Tengah**			**22.125.000.000,00**	
1.5.3.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Kalimantan Tengah**			**225.000.000,00**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Kalimantan Tengah**			**225.000.000,00**	

1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	50.000.000,00	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000,00	
1.5.3.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**2.150.000.000,00**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**2.150.000.000,00**	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan yangmemuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	150.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan yangmemuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	150.000.000,00	
1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200.000.000,00	
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	250.000.000,00	
1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Pengelolaan Risiko Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan	1 Kegiatan	100.000.000,00	

			Bencana					Bencana			
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	10 Orang	150.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	10 Orang	150.000.000,00	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	500 Keluarga	500.000.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	500 Keluarga	500.000.000,00	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	150.000.000,00	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	250.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	250.000.000,00	
1.5.3.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**16.950.000.000,00**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**16.950.000.000,00**	
1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	50.000.000,00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	50.000.000,00	
1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	1 Dokumen	100.000.000,00	

1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	125.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	125.000.000,00	
1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	200.000.000,00	
1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	75.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	75.000.000,00	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1.000.000.000,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1.000.000.000,00	
1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	15.000.000.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	15.000.000.000,00	
1.5.3.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**2.800.000.000,00**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kalimantan Tengah**			**2.800.000.000,00**	
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kalimantan Tengah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kalimantan Tengah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50.000.000,00	

1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	
1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Penduduk Terpilah di Daerah Rawan Bencana	1 Laporan	250.000.000,00	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Penduduk Terpilah di Daerah Rawan Bencana	1 Laporan	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dileglkan	1 Kegiatan	250.000.000,00	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dileglkan	1 Kegiatan	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	200.000.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	200.000.000,00	

1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan	300.000.000,00	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan	300.000.000,00	
1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga	150.000.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga	150.000.000,00	
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	200.000.000,00	
1.05.03.1.04.0014		Kalimantan Tengah	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	-	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	-	

						dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)					
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	150.000.000,00	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	150.000.000,00	
1.05.03.1.04.0019	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	-	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	-	
1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang	250.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang	250.000.000,00	
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kalimantan Tengah	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kalimantan Tengah	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	100.000.000,00	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	14 Kab/ Kota	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	14 Kab/ Kota	100.000.000,00	

1.05.03.1.04.0025	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	100.000.000,00	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada gubernur saat kujungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll. Usulan terkait program dan kegiatan dari masyarakat yang berdasarkan hasil pembahasan sampai tingkat Musrembang Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.25

Kegiatan Usulan Aspirasi dan Pokir

No	Usulan	Lokasi	Volume	Rekomendasi

Seiring dengan keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui website, media social (twitter, facebook, instagram, dll). Selain ditingkat pemerintah provinsi. Meskipun terhubung secara struktur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.

Beberapa Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026 yang berhubungan langsung dengan masyarakat:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta untuk mematuhi peraturan agar tidak melakukan pembakaran secara bersamaan dalam pembukaan lahan.
2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam memahami bencana alam maupun bencana sosial.
3. Kemitraan Pengelolaan antara berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah.
4. Koordinasi antara pihak terkait.
5. Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim.
6. Penyuluhan Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya.
7. Pengembangan Budaya Sadar Bencana.

Tabel 2.26
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Kalimantan Tengah**			
1.5.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	

1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	14 Data	
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	
1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	
1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	
1.05.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Kalimantan Tengah	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	14 Substansi	
1.5.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	

1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
1.5.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
1.5.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	
1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	

1.5.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	
1.5.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Kalimantan Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	
1.5.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1.5.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalimantan Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kalimantan Tengah**			
1.5.3.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	
1.5.3.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan yangmemuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	
1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	

1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	
1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Kegiatan	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	10 Orang	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	500 Keluarga	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	
1.5.3.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	
1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	1 Dokumen	
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	
1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	

1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	
1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	1 Laporan	
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	
1.5.3.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kalimantan Tengah**			
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kalimantan Tengah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Data Penduduk Terpilah di Daerah Rawan Bencana	1 Laporan	
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dileglkan	1 Kegiatan	

1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	
1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan	
1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga	
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	
1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Kalimantan Tengah	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	

1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0019	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang	
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kalimantan Tengah	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	14 Kab/ Kota	
1.05.03.1.04.0025	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah pusat mencanangkan adanya 8 prioritas nasional yang merupakan hasil pengejawantahan dari asta cita misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 :

Tabel 3.1 Delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Urutan	Deskripsi
Prioritas 1	Memperkokog ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Prioritas 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Prioritas 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kerwirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Prioritas 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Prioritas 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Prioritas 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Prioritas 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kebijakan nasional tahun 2026 memprioritaskan kedaulatan pangan, energi, dan air, mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi dan transformasi digital, serta memastikan pembangunan yang inklusif. Prioritas ini didukung oleh program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, digitalisasi pendidikan, dan penguatan koperasi. Fokus utama juga pada reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan pengurangan kesenjangan, dengan menekankan sinergi APBN, kualitas belanja, efisiensi anggaran, dan partisipasi multipihak untuk mencapai tujuan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Nasional 2026

- **Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air:** Memastikan ketahanan nasional dalam sektor pangan, energi, dan air.
- **Peningkatan Produktivitas Ekonomi:** Mendorong hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing ekonomi.

  Pembangunan Inklusif: Memastikan tidak ada warga yang tertinggal melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis.

Program Prioritas Unggulan

- **Program Makan Bergizi Gratis (MBG):**

  Program unggulan untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan mendukung kualitas hidup.
- **Penguatan SDM dan Daya Saing Daerah:**

  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di tingkat daerah.
- **Digitalisasi Pendidikan dan Pelayanan Publik:**

  Mendorong reformasi birokrasi melalui digitalisasi.
- **Penguatan Koperasi dan UMKM:**

  Pemberdayaan ekonomi melalui penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- **Pembangunan Infrastruktur:**

  Mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional.

Arah Kebijakan Fiskal 2026

- **Fokus pada Kualitas Belanja:**

  Mengoptimalkan belanja pegawai dan belanja barang untuk mendukung layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

- **Efisiensi Anggaran:**
  Melanjutkan upaya penghematan anggaran melalui pemangkasan pos belanja seperti rapat, perjalanan dinas, dan konsultan.
- **Pengelolaan Pendapatan:**
  Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, inovasi kebijakan, dan pengawasan untuk peningkatan penerimaan negara (PNBP).
- **Pengelolaan Pembiayaan Prudent:**
  Menjaga pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan.

Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

- **Sinergi RPJMN dan RAPBN:**
  Menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- **Kolaborasi Antar-Pemerintah:**
  Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi publik untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional.
- **Penguatan Tata Kelola:**
  Meningkatkan kualitas tata kelola, penyaluran dana, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana; dan Reviu berkala Dokumen Kajian Risiko Bencana;
2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana melalui Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam; Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana; Penyusunan dan Reviu Dokumen Rencana Kontijensi; Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana; Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
5. Peningkatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
6. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
7. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
8. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Arah kebijakan penanggulangan bencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 adalah membangun Indonesia yang tangguh bencana dengan fokus pada kolaborasi multi-sektor dan penguatan masyarakat untuk meningkatkan resiliensi bencana secara berkelanjutan melalui pendekatan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

Prinsip Umum dan Fokus Kebijakan

- **Penguatan Resiliensi Berkelanjutan**:
  Penekanan pada pembangunan ketahanan bencana di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
- **Kolaborasi Multi-sektor**:
  Diperlukan kerja sama erat antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- **Fokus pada Masyarakat**:
  Mengedepankan peran aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan bencana melalui partisipasi dan penguatan kapasitas di tingkat lokal.

Mekanisme Pelaksanaan

- **Penyusunan RENAS PB 2025-2029**:
  Dokumen ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) dan rencana strategis lainnya.
- **Sinergi dengan Pembangunan Nasional**:
  Kebijakan penanggulangan bencana diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra, serta menjadi bagian dari pengarusutamaan isu lingkungan dalam kerangka pembangunan nasional.

Tujuan Utama

- **Mewujudkan Indonesia Emas 2045**:
  Penanggulangan bencana menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai visi Indonesia Emas melalui penguatan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
- **Pengurangan Risiko Bencana (PRB)**:
  Mengurangi Indeks Risiko Bencana (IRBI) melalui integrasi konsep PRB ke dalam setiap kegiatan pembangunan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni :

"MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT KHUSUSNYA MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH UMUMNYA (MANGGATANG UTUS), DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG MAJU, MODERN, BERMARTABAT, DAN BERKAH, MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju

Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah:

1. **Kalteng Maju**. Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
2. **Kalteng Modern**. Kata Modern memberikan gambaran bahwa tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang modern, dengan penggunaan teknologi, kultur pelayanan publik yang benar-benar melayani, dan program-program yang memiliki paradigma modern. Harapannya, masyarakat akan merasakan dampak pembangunan secara lebih nyata, efektif, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia.
3. **Kalteng Bermartabat**. Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.
4. **Kalteng Berkah**. Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antarperiode di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka melaksanakan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah misi yang menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembangunan. Misi ini juga disusun sebagai arah dan batasan pembangunan yang akan dilakukan. Adapun misi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **MISI PERTAMA**: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam local.
2. **MISI KEDUA**: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat.
3. **MISI KETIGA**: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.

4. **MISI KEEMPAT**: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social.
5. **MISI KELIMA**: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Berdasarkan hal itu, maka pernyataan motto Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Tengah adalah:

"Kalteng Tangguh Bencana"

Untuk mewujudkan Kalteng Tangguh Bencana di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah maka Tujuan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan BencanaDaerah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Menurunnya indeks risiko bencana provinsi sesuai target nasional.
2. Meningkatnya kapasitas daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan sistem mitigasi bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim.
4. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan respon darurat bencana oleh BPBD dan pihak terkait.
5. Meningkatnya kualitas pemulihan pascabencana baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan BPBD melalui SDM yang kompeten, sistem informasi yang terpadu, serta pengelolaan anggaran yang efektif.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah visi misi dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2026-2029 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam misi kepala daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tertuang yaitu :

- **Misi** ke 3, Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
- **Tujuan** ke 6 : Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- **Sasaran** ke 18 : Berkurangnya risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana.
- **Strategi** : Pelatihan teknis ketangguhan bencana serta penyediaan sistem peringatan dini bencana dan Pelatihan serta edukasi terkait mitigasi bencana.

Dari tujuan dan sasaran yang sudah di tetapkan di RPJMD Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 1 Program Prioritas yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Kinerja yang bertujuan sebagai berikut :

- Persentase Penanganan Pra Bencana.
- Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana.
- Persentase pendampingan penanganan pasca bencana.
- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
- Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal.

Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan dan sasaran dengan indicator dan target proyeksi 5 tahun dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD	Indikator	Target	Target Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana 6,1 Point Berdasarkan SE Mendagri dan Bappenas	94,85	93,97	93,09	92,21	92,33	90,45
Sasaran RPJMD	**Indikator**	**Target**	**Target Proyeksi**					
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Meningkatnya	Indeks	Meningkatkan Indeks	0,49	0,53	0,55	0,57	0,60	0,62

Kapasitas Penanggulangan Bencana	Ketahan Daerah (IKD)	Ketahan Daerah 0,03 per tahun						

Program Prioritas BPBD Prov Kalteng	Indikator Kinerja	Target	Target Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	00%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	100%	68	70	73	76	79	82

- **TUJUAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029**

1. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas.
2. Mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media) dalam penanggulangan bencana.
5. Memulihkan dan membangun kembali daerah pascabencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

- **SASARAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029**

1. Menurunnya indeks risiko bencana provinsi sesuai target nasional.
2. Meningkatnya kapasitas daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan sistem mitigasi bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim.
4. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan respon darurat bencana oleh BPBD dan pihak terkait.
5. Meningkatnya kualitas pemulihan pascabencana baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan BPBD melalui SDM yang kompeten, sistem informasi yang terpadu, serta pengelolaan anggaran yang efektif.

- **STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029**

Strategi ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi BPBD yang mencakup kebijaksanaan organisasi, program operasional organisasi dan kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi yaitu :

Pencegahan & Mitigasi

- Penguatan regulasi daerah terkait mitigasi bencana.
- Pembangunan infrastruktur pengendali risiko bencana (tanggul, early warning system, jalur evakuasi).

- Pemetaan dan kajian risiko bencana berbasis data spasial.

Kesiapsiagaan

- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan pendidikan kebencanaan.
- Penguatan sistem peringatan dini terpadu.
- Pengembangan relawan dan desa/kelurahan tangguh bencana.

Tanggap Darurat

- Penguatan sistem komando dan koordinasi penanganan darurat bencana.
- Optimalisasi logistik dan peralatan bencana.
- Pemanfaatan teknologi digital (dashboard, aplikasi, big data).

Pemulihan & Rehabilitasi

- Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis build back better.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.
- Pemulihan sosial dan lingkungan pascabencana.

Tata Kelola & SDM

- Peningkatan kapasitas ASN dan tenaga teknis BPBD.
- Integrasi sistem informasi kebencanaan dengan provinsi dan nasional.
- Penguatan kerjasama antar lembaga (pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, akademisi, swasta, NGO).

- **ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029**

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dalam setiap rencana pembangunan daerah.
2. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur mitigasi dan pemanfaatan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Pengembangan sistem informasi kebencanaan terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana.
6. Percepatan pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabencana dengan prinsip keberlanjutan.
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM BPBD agar profesional, responsif, dan adaptif.

TABEL 3.3
TUJUAN, INDIKATOR, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Program PD yang mendukung PN	Indikator Program	Kegiatan PD
Meningkatkan Ketahanan Daerah melalui ketangguhan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Indek Ketahanan daerah	Penanganan Pra Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penanganan Tanggap Bencana Darurat		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penanganan Pasca Bencana		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

		Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		Penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

		Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam pencapaian tujuan meningkatkan ketahanan daeran menghadapi bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk tahun 2026, alokasi APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar **Rp. 38.806.773.068,74**,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat)* yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan. Ringkasan program kegiatan, target dan pagu anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Usulan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**38.806.773.068,74**				**39.328.489.310,69**
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**38.806.773.068,74**				**39.328.489.310,69**
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Kalimantan Tengah**		**16.681.773.068,74**				**19.500.000.000,00**
1.5.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**890.000.000,00**				**925.000.000,00**
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	200.000.000,00	PAD		3 Dokumen	350.000.000,00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.000.000,00	PAD		1 Dokumen	17.500.000,00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.000.000,00	PAD		1 Dokumen	17.500.000,00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.000.000,00	PAD		1 Dokumen	17.500.000,00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.000.000,00	PAD		1 Dokumen	17.500.000,00
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Tengah	2 Laporan	30.000.000,00	PAD		2 Laporan	30.000.000,00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	3 Laporan	200.000.000,00	PAD		3 Laporan	250.000.000,00

1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	14 Data	50.000.000,00	PAD		14 Data	50.000.000,00
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Tengah	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara		1 Berita Acara	50.000.000,00
1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD		1 Dokumen	50.000.000,00
1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	75.000.000,00	PAD		3 Dokumen	25.000.000,00
1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kalimantan Tengah	1 Berita Acara	75.000.000,00	PAD		1 Berita Acara	50.000.000,00
1.05.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Kalimantan Tengah	14 Substansi	-	PAD		14 Substansi	-
1.5.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**10.951.773.068,74**				**10.690.000.000,00**
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Tengah	42 Orang/ Bulan	10.066.773.068,74	PAD		42 Orang/ Bulan	9.750.000.000,00
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	800.000.000,00	PAD		1 Dokumen	850.000.000,00
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Tengah	1 Laporan	30.000.000,00	PAD		1 Laporan	30.000.000,00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kalimantan Tengah	1 Laporan	25.000.000,00	PAD		1 Laporan	30.000.000,00
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	30.000.000,00	PAD		1 Dokumen	30.000.000,00
1.5.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**230.000.000,00**				**340.000.000,00**
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.000.000,00	PAD		1 Dokumen	20.000.000,00
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	1 Laporan	15.000.000,00	PAD		1 Laporan	20.000.000,00
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Tengah	1 Laporan	200.000.000,00	PAD		1 Laporan	300.000.000,00

1.5.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**180.000.000,00**				**215.000.000,00**
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Tengah	1 Paket	-	PAD		1 Paket	-
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	30.000.000,00	PAD		1 Dokumen	30.000.000,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Tengah	10 Orang	50.000.000,00	PAD		10 Orang	55.000.000,00
1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Tengah	65 Orang	100.000.000,00	PAD		65 Orang	130.000.000,00
1.5.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**840.000.000,00**				**855.000.000,00**
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Paket	40.000.000,00	PAD		1 Paket	45.000.000,00
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Tengah	12 Paket	300.000.000,00	PAD		12 Paket	300.000.000,00
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kalimantan Tengah	5 Paket	20.000.000,00	PAD		5 Paket	25.000.000,00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Paket	20.000.000,00	PAD		1 Paket	20.000.000,00
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	30.000.000,00	PAD		1 Dokumen	30.000.000,00
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Tengah	1 Laporan	30.000.000,00	PAD		1 Laporan	35.000.000,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	14 Laporan	400.000.000,00	PAD		14 Laporan	400.000.000,00
1.5.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**700.000.000,00**				**1.300.000.000,00**
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kalimantan Tengah	10 Unit		PAD		10 Unit	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Paket	200.000.000,00	PAD		1 Paket	300.000.000,00
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kalimantan Tengah	3 Unit	500.000.000,00	PAD		3 Unit	1.000.000.000,00
1.5.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**1.090.000.000,00**				**1.820.000.000,00**
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Tengah	1 Laporan	15.000.000,00	PAD		1 Laporan	20.000.000,00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Laporan	600.000.000,00	PAD		1 Laporan	550.000.000,00

1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Tengah	1 Laporan	475.000.000,00	PAD		1 Laporan	1.250.000.000,00
1.5.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kalimantan Tengah**		**1.800.000.000,00**				**3.355.000.000,00**
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Tengah	37 Unit	1.000.000.000,00	PAD		37 Unit	800.000.000,00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kalimantan Tengah	12 Unit	100.000.000,00	PAD		12 Unit	125.000.000,00
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kalimantan Tengah	3 Unit	700.000.000,00	PAD		3 Unit	2.430.000.000,00
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Kalimantan Tengah**		**22.125.000.000,00**				**19.828.489.310,69**
1.5.3.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**		**Kalimantan Tengah**		**225.000.000,00**				**200.000.000,00**
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Kalimantan Tengah	100 Orang	175.000.000,00	PAD		100 Orang	200.000.000,00
1.5.3.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		**Kalimantan Tengah**		**2.150.000.000,00**				**2.450.000.000,00**
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yangmemuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kalimantan Tengah	14 Kawasan	150.000.000,00	PAD		14 Kawasan	150.000.000,00
1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Kalimantan Tengah	100 Orang	200.000.000,00	PAD		100 Orang	250.000.000,00
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	250.000.000,00	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	100.000.000,00	PAD		1 Kegiatan	150.000.000,00
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	10 Orang	150.000.000,00	PAD		10 Orang	200.000.000,00

1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	500 Keluarga	500.000.000,00	PAD		500 Keluarga	1.250.000.000,00
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000,00	PAD		1 Dokumen	175.000.000,00
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kalimantan Tengah	50 Orang	250.000.000,00	PAD		50 Orang	275.000.000,00
1.5.3.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Kalimantan Tengah**		**16.950.000.000,00**				**13.993.489.310,69**
1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kalimantan Tengah	1 Laporan	50.000.000,00	PAD		1 Laporan	75.000.000,00
1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD		1 Dokumen	100.000.000,00
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	1 Laporan	125.000.000,00	PAD		1 Laporan	150.000.000,00
1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kalimantan Tengah	50 Orang	200.000.000,00	PAD		50 Orang	200.000.000,00
1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kalimantan Tengah	1 Laporan	75.000.000,00	PAD		1 Laporan	100.000.000,00
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kalimantan Tengah	1000 Orang	1.000.000.000,00	PAD		1000 Orang	2.000.000.000,00
1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	PAD		1 Dokumen	200.000.000,00
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	1 Laporan	200.000.000,00	PAD		1 Laporan	300.000.000,00
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kalimantan Tengah	1 Laporan	15.000.000.000,00	PAD		1 Laporan	10.868.489.310,69
1.5.3.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Kalimantan Tengah**		**2.800.000.000,00**				**3.185.000.000,00**
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kalimantan Tengah	50 Keluarga	50.000.000,00	PAD		50 Keluarga	60.000.000,00
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	500.000.000,00	PAD		1 Dokumen	500.000.000,00

1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah Data Penduduk Terpilah di Daerah Rawan Bencana	Kalimantan Tengah	1 Laporan	250.000.000,00	PAD		1 Laporan	250.000.000,00
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dileglkan	Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	250.000.000,00	PAD		1 Kegiatan	300.000.000,00
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kalimantan Tengah	1 Lembaga	200.000.000,00	PAD		1 Lembaga	200.000.000,00
1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Laporan	300.000.000,00	PAD		1 Laporan	300.000.000,00
1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Lembaga	150.000.000,00	PAD		1 Lembaga	150.000.000,00
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kalimantan Tengah	50 Orang	200.000.000,00	PAD		50 Orang	200.000.000,00
1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	200.000.000,00
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	PAD		1 Dokumen	200.000.000,00
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000,00	PAD		1 Dokumen	175.000.000,00

1.05.03.1.04.0019	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	-	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kalimantan Tengah	50 Orang	250.000.000,00	PAD		50 Orang	250.000.000,00
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD		1 Dokumen	125.000.000,00
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	Kalimantan Tengah	14 Kab/ Kota	100.000.000,00	PAD		14 Kab/ Kota	125.000.000,00
1.05.03.1.04.0025	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD		1 Dokumen	150.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan isu-isu pokok yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan berkenaan dengan pelaksanaan Penanggulangan Bencana dapat diidentifikasi sebagai berikut :

”Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan penanggulangan bencana ”

Pada Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp. 38.806.773.068,74,-**. Hal ini berkaitan dengan beberapa permasalahan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di daerah. Sehingga dalam pendekatan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Program kegiatan antara lain :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**38.806.773.068,74**							**73.630.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.806.773.068,74**							**73.630.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**38.806.773.068,74**							**73.630.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**16.681.773.068,74**						**-**	**19.080.000.000,00**	
		[Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah]	**Nilai SAKIP**	**82**	**65**	**68**	**70**	**16.681.773.068,74**	-	-	-	-	-	-	**19.080.000.000,00**	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	890.000.000,00			-	-	-	-	1.195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				14 Data	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.951.773.068,74			-	-	-	-	12.010.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	10.066.773.068,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	-	-	-	290.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	840.000.000,00			-	-	-	-	965.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.090.000.000,00			-	-	-	-	1.170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**22.125.000.000,00**						**-**	**54.550.000.000,00**	
		[Meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka mengurangi resiko bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana** **Persentase Penanganan Pasca Bencana** **Persentase penanganan pra bencana** **Persentase penanganan tanggap bencana darurat** **Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal**	**100** **80**	**100** **50**	**100** **55**	**100** **60**	**22.125.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**54.550.000.000,00**	-
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-			-	225.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				100 Orang	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	2.150.000.000,00			-	-	-	-	2.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				14 Kawasan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				500 Keluarga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	16.950.000.000,00			-	-	-	-	47.775.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		45.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	2.800.000.000,00			-	-	-	-	3.775.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi				1 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)														
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi														
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				50 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				14 kabupaten/kota	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor														
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H							**38.806.773.068,74**							**73.630.000.000,00**	

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
2. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan tata ruang.
3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
4. Melakukan pengkajian, pemantauan dan penangganan tanggap darurat bencana.
5. Melakukan pemberian bantuan darurat kemanusiaan.
6. Melakukan evakuasi dan relokasi korban bencana.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) menjadi semangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan ketertiban lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Proses perencanaan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD.
c. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses keegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan yang berdaya guna dan berhasil guna.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah baik di masa mendatang.

Palangka Raya, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790903 199711 1 001

LAMPIRAN III PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**55.646.136.227**	**39.328.489.310,69**	
	1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**55.646.136.227**	**39.328.489.310,69**	
	1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah**	**100%**					**15.764.136.227**	**19.500.000.000,00**	
	1.5.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**			**453.000.000**	**925.000.000,00**	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	230.000.000	350.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000,00	
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000,00	
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000,00	
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000,00	
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000	30.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	133.000.000	250.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	14 Data	-	50.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	50.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	50.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	-	25.000.000,00	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Kalimantan Tengah					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	-	50.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		Kalimantan Tengah					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	14 Substansi	-	-	
	1.5.1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**			**10.010.350.000**	**10.690.000.000,00**	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kalimantan Tengah					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	9.071.068.776	9.750.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	854.281.224	850.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	30.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	25.000.000	30.000.000,00	
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000,00	
	1.5.1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**			**106.650.000**	**340.000.000,00**	
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.325.000	20.000.000,00	
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.325.000	20.000.000,00	
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000	300.000.000,00	
	1.5.1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**			**165.000.000**	**215.000.000,00**	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	55.000.000,00	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kalimantan Tengah					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	115.000.000	130.000.000,00	
	1.5.1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**			**952.911.227**	**855.000.000,00**	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	351.775.000	45.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.392.457	300.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	25.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	20.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	35.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	200.743.770	400.000.000,00	
	1.5.1.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**			**500.000.000**	**1.300.000.000,00**	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kalimantan Tengah					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	-		
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		Kalimantan Tengah					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	300.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kalimantan Tengah					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	1.000.000.000,00	
	1.5.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**			**1.827.225.000**	**1.820.000.000,00**	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	20.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000	550.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.322.225.000	1.250.000.000,00	
	1.5.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**			**1.749.000.000**	**3.355.000.000,00**	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kalimantan Tengah					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	620.000.000	800.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kalimantan Tengah					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	100.000.000	125.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kalimantan Tengah					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.029.000.000	2.430.000.000,00	
	1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**Data informasi dan pelaporan kebencanaan**	**100%**					**39.257.000.000**	**19.828.489.310,69**	
	1.5.3.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**					**Tersedianya Informasi dan Edukasi Menghadapi Bencana**	**100%**			**187.500.000**	**200.000.000,00**	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	23.500.000	-	
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		Kalimantan Tengah					Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	164.000.000	200.000.000,00	
	1.5.3.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					**Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**100%**			**730.000.000**	**2.450.000.000,00**	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah laporan yangmemuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	-	150.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	-	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	85.000.000	250.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	-	-	
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	210.000.000	-	
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Kegiatan	125.000.000	150.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	10 Orang	50.000.000	200.000.000,00	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	500 Keluarga	35.000.000	1.250.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	25.000.000	175.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	200.000.000	275.000.000,00	
	1.5.3.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**Persentase Pemenuhan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**			**37.601.500.000**	**13.993.489.310,69**	
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	16.500.000	75.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	1 Dokumen	-	100.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	17.000.000	150.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	-	200.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	17.000.000	100.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	67.000.000	2.000.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	-	200.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	1 Laporan	36.322.500	300.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	37.447.677.500	10.868.489.310,69	
	1.5.3.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**					**Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana dan terkelolanya pemanfaatan informasi kebencanaan**	**100%**			**738.000.000**	**3.185.000.000,00**	
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Kalimantan Tengah					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	-	60.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	247.000.000	500.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Data Penduduk Terpilah di Daerah Rawan Bencana	1 Laporan	-	250.000.000,00	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor susuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dileglkan	1 Kegiatan	218.000.000	300.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	-	200.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Laporan	-	300.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga	-	150.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	-	200.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)		Kalimantan Tengah					Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	-	200.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	28.000.000	200.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	135.000.000	175.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0019	Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	-	-	
	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi		Kalimantan Tengah					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang	-	250.000.000,00	

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Kalimantan Tengah					Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	35.000.000	125.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	14 Kab/ Kota	75.000.000	125.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0025	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	-	150.000.000,00	
	1.5.4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**Persentase peningkatan pemadam kebakaran**	**100%**					**625.000.000**		
	1.5.4.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**					**Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran**	**100%**			**474.000.000**		
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	67.000.000		
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	85.000.000		
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	84.000.000		
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Kalimantan Tengah					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	-		

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	-		
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	84.000.000		
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	64.000.000		
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi		Kalimantan Tengah					Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	14 Kab/ Kota	90.000.000		
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kalimantan Tengah					Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	10 Unit	-		
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Kalimantan Tengah					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	-		
	1.5.4.1.02	**Pembinaan dan Pegawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**									**151.000.000**		

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Proritas Daerah	Lokasi	Indkator Kinerja						Pagu Tahun 2025	Pagu Usulan 2026	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	1 Laporan	70.000.000		
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	1 Laporan	81.000.000		
	1.05.04.1.02.0005	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	-		
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota		Kalimantan Tengah					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan	-		

LAMPIRAN IV INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2025	Rencana 2026	Kesepakatan Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
I.	**Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**					
5	**Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**					
5.12	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	100	BPBD
5.13	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	BPBD
5.14	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	100	100	100	BPBD
5.15	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	100	100	100	BPBD
5.16	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	12	12	BPBD
5.17	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompoten	10	10	10	10	BPBD
5.18	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100	100	BPBD
5.19	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	0	100	0	100	BPBD